

Tahun Penuh Warna

Hal 4

Upaya BPK Memperkuat Manajemen Risiko dan Pengendalian Mutu

Hal 21

BPK Pertegas Komitmen Jaga Kode Etik

Hal 42



Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang hebat jika bersatu dan bersinergi.

# BPK Jadi Pemeriksa Eksternal



**INTERNATIONAL  
MARITIME  
ORGANIZATION**

- 3 Dari Redaksi
- 4 Tahun Penuh Warna
- 15 BPK Terpilih Jadi Pemeriksa Eksternal IMO
- 18 BPK Bangun SDM Unggul
- 21 Upaya BPK Memperkuat Manajemen Risiko dan Pengendalian Mutu
- 23 Evolusi Badan Diklat BPK
- 25 IDI-ASOSAI Review LHP Kesiapan Implementasi SDGs
- 26 BPK Berbagi Ilmu dengan CAG Zanzibar
- 28 BPK Hadiri Sidang Tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal PBB
- 29 BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan Kinerja IAEA 2019
- 30 BPK Bantu SAI Vietnam Kembangkan Organisasi
- 31 BPK RI dan BPK Arab Saudi Teken MoU



- 32 Bahrullah Akbar, Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V BPK Pendidikan Kunci Kesuksesan
- 36 Elvyana, Ketua Komite IV DPD RI DPD Siap Bekerja Sama Lebih Erat dengan BPK
- 38 Pasolart, Dukungan Pegawai BPK Bagi Tenun Sumba Timur
- 40 Berkreasi Lewat Korps Musik BPK
- 42 BPK Pertegas Komitmen Jaga Kode Etik
- 43 BPK Dorong Pemda Tingkatkan Tindak Lanjut Rekomendasi
- 44 BAP DPD Konsultasikan Keuangan Daerah
- 45 Ganda Putra Tenis BPK Raih Emas di Pornas Korpri ke-XV
- 46 Kerja Bareng untuk Kualitas Anggaran BPK
- 49 Berita Foto





**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan kabar gembira dari London, Inggris. Sidang Majelis Dewan International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional menyatakan Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2020-2021 dalam sidang IMO Assembly, Sabtu (29/11) di London.

Tak hanya itu, BPK Indonesia juga terpilih sebagai auditor eksternal IMO mengalahkan Inggris dan Italia. Kemenangan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Antara lain karena BPK merupakan lembaga di negara Asia Tenggara pertama yang dipilih menjadi auditor eksternal IMO.

Prestasi ini tak lain sebagai bentuk kepercayaan internasional atas kualitas auditor Indonesia. Apalagi, sebelumnya BPK juga dipercaya sebagai auditor eksternal pada organisasi internasional lainnya, yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Anti Corruption Academy (IACA).

Ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik dari kemenangan ganda Indonesia di kancah internasional kali ini, yaitu persatuan. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kehormatan ini tentunya tidak mudah. Akan tetapi, dengan bersatu, medan yang berat itu pun bisa ditaklukkan. Terkait keberhasilan di IMO, BPK menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan. Tiga lembaga ini sama-sama menurunkan tim terbaik untuk melakukan negosiasi sehingga Indonesia dapat meraih kesuksesan dalam sidang IMO Assembly.

Persatuan ini yang menjadi semangat BPK ke depannya. Dengan struktur pimpinan yang baru, BPK berkomitmen untuk semakin meningkatkan persatuan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Semangat itu juga yang ingin redaksi bagikan kepada seluruh pembaca *Warta Pemeriksa*, khususnya pada edisi Desember ini. Dengan persatuan, setiap tantangan akan dapat dihadapi dengan lebih mudah.

Ini merupakan edisi penutup tahun 2019. Karenanya, kami juga menyajikan berbagai informasi menarik lainnya. Semisal kaleidoskop liputan sepanjang tahun 2019. Kemudian wawancara redaksi dengan Anggota V Bahrullah Akbar yang termuat dalam rubrik Sosok dan berbagai informasi menarik lainnya. Selamat menikmati. ●

## Tim Editorial

### Pengarah

Agung Firman Sampurna  
Agus Joko Pramono  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Redaksi

Bidramnanta  
Iqra Fiqh  
Yudha Bayangkara  
Putra Zamrud  
Aksara Bentala  
Ren Jingga

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Sudarman

### Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Diterbitkan oleh:  
Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

# TAHUN PENUH WARNA

**T**ahun 2019 merupakan tahun yang penuh warna bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun ini, terdapat perubahan Badan yang menjadi semangat baru bagi BPK dalam menjalankan tugasnya dan adanya aturan baru mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). Pada tahun ini pula, BPK menorehkan prestasinya karena terpilih menjadi pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional. *Warta Pemeriksa* mencoba merangkum perjalanan dan kiprah BPK selama setahun terakhir ini. Ada banyak isu yang dirasa layak untuk ditampilkan sebagai kaleidoskop.

## (JANUARI)

### Pembekalan untuk Para Pemeriksa

BPK langsung tancap gas sejak awal tahun 2019. Pada 15 Januari 2019, BPK mengumpulkan ratusan pemeriksa di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Para pemeriksa dikumpulkan untuk mendengarkan arahan dari para Pimpinan dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018.

Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V Bahrullah Akbar yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua BPK dalam pidatonya saat membuka acara mengatakan, *workshop* sangat penting dilakukan. Sebab, pemeriksaan atas LKPP, LKKL dan LKBUN merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BPK, dan Undang-Undang APBN.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPR atas rancangan UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pemerintah. "Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan



helloquenc-unsplash

pemeriksaan ini dengan sebaik-baiknya karena waktu yang terbatas, nilai APBN yang semakin besar, dan banyaknya entitas yang diperiksa, serta keterlibatan jumlah pemeriksa yang banyak dari seluruh AKN (Auditorat Keuangan Negara),” kata Bahrullah.

Pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN ini merupakan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP.

Ketiga, Bahrullah menambahkan, dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan. Terakhir, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Bahrullah mengatakan walaupun sudah dilakukan secara rutin, namun pemeriksaan ini selalu menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Hal itu lantaran adanya perubahan dan dinamika di lingkungan internal pemeriksa dan lingkungan eksternal.

Bahrullah juga berpesan kepada seluruh pemeriksa agar tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme agar hasil pemeriksaan tetap objektif. Pesan itu disampaikan Bahrullah mengingat tahun 2019 diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah, BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN Tahun 2018 dapat memberikan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan strategis dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun pertanggungjawabannya.

Permasalahan-permasalahan yang berdampak pada opini agar diperlakukan secara konsisten antar kementerian/ lembaga. “Oleh karena itu, Tim Pokja LKPP agar benar-benar mengawasi konsistensi dalam pemberian opini tersebut,” Bahrullah berpesan.

**(FEBRUARI)**

## Babak Baru Jabatan Fungsional Pemeriksa

Aturan baru tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) telah diterbitkan pada Oktober 2018. Ada berbagai perubahan signifikan terkait JFP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 49 Tahun 2018.

Dengan adanya peraturan baru itu, pengembangan ka-



rier JFP diubah dari berbasis peran menjadi berbasis jabatan. Sebelumnya, ada enam level peran JFP, yaitu anggota tim junior, anggota tim senior, ketua tim junior, ketua tim senior, pengendali teknis, dan pengendali mutu.

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif menjelaskan, Permenpan terbaru mengatur jabatan fungsional pemeriksa sesuai dengan kerangka Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen PNS dan tentang jabatan fungsional secara keseluruhan. “Implikasinya banyak dengan adanya perubahan itu. Mulai dari standar kompetensi hingga remunerasi. Inilah salah satu hal baru dalam Permenpan Nomor 49 Tahun 2018,” kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, dalam aturan sebelumnya, yaitu Permenpan Nomor 17 Tahun 2010, pemeriksa dalam setiap jenjang jabatan menjalankan peran tertentu. Di peraturan terbaru, enam peran ini tidak lagi digunakan sebagai pengembangan karier pemeriksa.

“Jadi, jabatan fungsionalnya ditentukan berdasarkan pangkat dan golongan tertentu. Kalau sebelumnya, karena berbasis kepada kemampuan dan kualifikasi, pemeriksa harus berkarier di peran tertentu, baru nanti jabatannya, pangkat, dan golongannya mengikuti,” kata Bahtiar.

Meski begitu, dia menegaskan, tetap akan ada proses asesmen untuk menentukan kenaikan jabatan. Bahkan, ada jenis asesmen yang baru, yakni asesmen teknis, asesmen *social cultural*, dan asesmen manajerial. Setiap jenjang jabatan juga memiliki angka kredit yang harus dipenuhi pemeriksa. Selama pemeriksa bisa memenuhi target dan lulus asesmen, mereka bisa naik pangkat. “Tapi kalau itu tak tercapai, justru nanti bisa diberhentikan. Nah, konsep di Permenpan baru soal JFP ini tidak ada penurunan jabatan, yang ada selesai atau naik jabatan,” katanya.

Sebelumnya, saat masih berbasis peran, pernah ada beberapa kasus penurunan jabatan. Penurunan peran juga pernah terjadi, misalnya dari ketua tim senior menjadi ketua tim junior. Kalau sekarang, intinya pemeriksa harus bisa memenuhi target angka kreditnya. “Kalau enggak ya berhenti dari Jabatan Fungsional Pemeriksa,” Bahtiar menegaskan.

Angka kredit merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pemeriksa untuk pembinaan karier yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan, ada angka kredit akumulatif yang harus dicapai oleh pemeriksa.

Menurut Bahtiar, angka kredit dibagi ke dalam beberapa jenis. Selain soal penilaian atas kinerja pemeriksa, juga mencakup penilaian terhadap pendidikan dan pelatihan. Semakin banyak pemeriksa mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka akan semakin banyak juga angka kredit yang didapat. "Ini sebetulnya juga dalam rangka untuk peningkatan kapasitas. Pemeriksa kan tidak harus memeriksa terus. Harus ikut pendidikan juga seperti menulis, mengajar, dan sebagainya," kata Bahtiar.

Hal baru lainnya terkait JFP adalah ruang lingkup kerja. JFP ke depan tidak lagi hanya bekerja untuk satuan kerja (satker) pemeriksaan, tetapi juga untuk satker-satker lain yang menjadi penunjang pemeriksaan. Misalnya Direktorat Litbang, EPP, Binbangkum, Itama, dan Biro TI. "Kegiatan-kegiatan penunjang itu diakumulasi dalam angka kredit pemeriksaan. Sehingga, mereka walaupun bukan di unit pemeriksaan, tapi mereka bekerja untuk mendukung pemeriksaan, itu mereka bisa diakui kreditnya. JFP yang baru ini membuka dan mengakui kegiatan-kegiatan penunjang pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan itu, seperti bagian dalam pemeriksaan," katanya.

**(MARET)**

## Peran BPK dalam Memberantas Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Sebab, BPK berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan BPK yang mengandung indikasi pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

Salah satu satuan kerja di BPK yang sering bersinergi dengan aparat penegak hukum adalah Auditorat Utama Investigasi (AUI). Satuan kerja khusus yang dibentuk sejak November 2016 ini bertugas melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara, penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA).

Hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA oleh BPK dimanfaatkan instansi berwenang dan diproses lebih lanjut melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan. Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Daerah Najmatuzzahrah mengatakan, pemeriksaan investigatif bukanlah hal baru di BPK. AUI dibentuk agar BPK semakin optimal dalam menangani banyaknya permintaan untuk melakukan pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA dari aparat penegak hukum.

"Dengan dibentuknya satuan kerja yang khusus menangani pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, maka diharapkan penanganan atas pemeriksaan tersebut menjadi lebih terpadu," kata Najmatuzzahrah.

Ia mengatakan, AUI dalam melaksanakan tugasnya memang tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan dengan aparat penegak hukum. Dia menegaskan, AUI selalu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK terkait dengan permintaan pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA atas kasus tindak pidana korupsi. AUI juga selalu mengundang para aparat penegak hukum untuk melakukan pemaparan kasus sebelum memutuskan untuk menerima permintaan pemeriksaan investigatif dan PKN dari aparat penegak hukum untuk kemudian dilaporkan kepada Pimpinan BPK dalam Sidang Badan.

Selama Tahun 2017 dan 2018, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,31 triliun. Sebanyak 5 LHP Investigatif merupakan inisiatif BPK dengan nilai indikasi kerugian yang ditemukan sebesar Rp165,40 miliar. Adapun sisanya merupakan permintaan Kepolisian RI 5 LHP, KPK 1 LHP, dan DPR 4 LHP. Sementara, dalam hal pemberian keterangan ahli (PKA), BPK telah melaksanakan 338 PKA di depan penyidik maupun di persidangan terkait dengan laporan hasil PKN yang telah diterbitkan selama Tahun 2017 dan 2018.

**(APRIL)**

## Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2018

Pada edisi April 2019, *Warta Pemeriksa* mengangkat tema mengenai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS II 2018 terdiri atas 2



LHP keuangan, 244 LHP kinerja, dan 250 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 2 LKPHLN (Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) Tahun 2017. Terkait pemeriksaan kinerja, BPK mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Sementara, hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 177 (71 persen) dari 250 objek pemeriksaan.

Dalam ikhtisar ini diuraikan temuan BPK yang mencapai 4.376 dengan jumlah permasalahan sebanyak 6.076. Ribuan permasalahan tersebut meliputi 1.203 (20 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 2.161 (35 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun.

Selain itu, BPK menemukan 2.712 (45 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Dari 2.161 permasalahan ketidakpatuhan, sebanyak 1.600 (74 persen) senilai Rp4,79 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 885 (55 persen) permasalahan senilai Rp782,15 miliar. Kemudian, potensi kerugian sebanyak 344 (22 persen) permasalahan senilai Rp714,43 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23 persen) permasalahan senilai Rp3,30 triliun. Selain itu, terdapat 561 (26 persen) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.712 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3 persen) permasalahan ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1 persen) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96 persen) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, entitas yang diperiksa pada saat pemeriksaan selama Semester II Tahun 2018, telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar (8 persen).

IHPS II 2018 berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang) Slamet Kurniawan mengatakan, hal spesial yang terdapat dalam IHPS II 2018 adalah banyaknya jumlah tema dan fokus pemeriksaan. Biasanya, kata Slamet, dalam satu tahun hanya ada 2 hingga 3 tema pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. "Tetapi, sekarang bisa 10 tema dari 12 tema. IHPS II 2018 juga memuat 12 fokus dari 18 fokus pemeriksaan. Ini sangat luar biasa," kata Slamet kepada Warta Pemeriksa.

Seperti diketahui, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. 12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

BPK juga dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

**(MEI)**

## Hasil Pemeriksaan Pendidikan di Semester II

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Salah satu tema tersebut adalah Pendidikan.

Pada semester II 2018, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, khususnya terkait dengan fokus Program Indonesia Pintar serta akses kualitas dan relevansi perguruan tinggi. Pemeriksaan tersebut meliputi penetapan daya tampung perguruan tinggi negeri dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar), serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian. Ketiga pemeriksaan itu dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018.

Pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun anggaran 2016 dan 2017 dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



(Kemenristekdikti) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif. Untuk menjalankan program tersebut, Kemenristekdikti dan PTN antara lain telah menetapkan regulasi penetapan daya tampung untuk masing-masing pola penerimaan. Kemudian, Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung.

Panitia pusat juga telah membuat Prosedur Operasional Baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN. Meski begitu, ada sejumlah permasalahan yang ditemukan. Beberapa permasalahan itu adalah belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN. Perencanaan anggaran SBMPTN juga belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp18,85 miliar.

**(JUNI)**

## Pemerintah Pusat Pertahankan Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Dengan begitu, pemerintah pusat berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2018 disampaikan BPK kepada DPR RI dan DPD RI dalam sidang paripurna pada 28 Mei 2019. Sehari berselang, BPK menyerahkannya secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Dalam kedua kesempatan tersebut, BPK turut menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018.

Moermahadi Soerja Djanegara yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua BPK menjelaskan, pemeriksaan atas LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemeriksaan dilakukan terhadap LKPP sebagai laporan keuangan konsolidasian dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dari 87 laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini WTP terhadap 81 LKKL dan 1 LKBUN (95 persen). "Jumlah





laporan keuangan yang meraih opini WTP meningkat dibandingkan Tahun 2017 yang sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN (91 persen)," kata Moermahadi dalam pidatonya saat menyampaikan LHP atas LKPP 2018 dan IHPS II 2018 kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.

Meski masih ada yang belum meraih WTP, namun jumlah LKKL yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) turun menjadi 4 LKKL dibandingkan 2017 yang sebanyak 6 LKKL. Sedangkan yang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) hanya 1 LKKL, yang juga turun dibandingkan 2017 sebanyak 2 LKKL.

Permasalahan pelaporan pertanggungjawaban APBN 2018 pada 5 LKKL yang tidak memperoleh opini WTP meliputi permasalahan kas setara kas, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud. Moermahadi menjelaskan, opini WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN baik di tingkat kementerian/lembaga maupun di tingkat konsolidasian pemerintah pusat," kata Moermahadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. Presiden juga meminta K/L menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) agar semakin banyak yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat menerima BPK pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. Presiden dalam sambutannya mengaku sangat bersyukur karena kembali meraih opini WTP untuk LKPP 2018. "Alhamdulillah, kita wajib bersyukur karena selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016, pemerintah pusat mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material sudah di sajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan," kata Presiden.

Presiden semakin bersyukur karena jumlah entitas pemeriksaan yang meraih opini WTP mengalami peningkatan. Pada 2016, ada 74 entitas yang meraih WTP, 2017 sebanyak 80 entitas, dan 2018 sebanyak 82 entitas. "Artinya, sudah mencapai 95 persen dari jumlah KL yang ada," ujar Presiden.

**(JULI)**

## WTP Saja tak Cukup

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan tak berhenti setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan entitas diserahkan. BPK akan terus bekerja hingga entitas menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal tersebut ditegaskan Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat masih menjabat sebagai Anggota I - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I, ketika menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I, di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, Kamis (20/6).

Agung menyerahkan LHP kepada 14 entitas dari 20 entitas yang berada di bawah AKN I. LHP yang diserahkan meliputi LKKL Kemenko Polhukam, BIN, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, BNN, Basarnas, KPU, Bawaslu, dan BMKG. Sebanyak 17 entitas di bawah AKN I meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sisanya, 2 entitas meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 entitas mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Agung dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada entitas yang telah berhasil mencapai opini WTP. Ia berharap entitas yang belum meraih WTP dapat terus berusaha meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Meski demikian, kata Agung, komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan yang diraih.

“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan,” kata Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Agung memaparkan mengenai hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada 20 entitas untuk periode 2005 sampai dengan semester II Tahun 2018. Ia memerinci, terdapat 8.735 temuan senilai Rp47,74 triliun dan 17.958 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp8,03 triliun. Dari jumlah tersebut, ujar Agung, sebanyak 14.477 rekomendasi atau 80,61 persen dari total rekomendasi senilai Rp5,19 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. “Angka 80,61 persen ini di atas rata-rata tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh entitas di Indonesia yang baru berkisar 75,30 persen,” kata Agung.

Adapun sebanyak 2.167 rekomendasi atau 12,07 persen telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut senilai Rp2,50 triliun. Kemudian, sebanyak 1.262 rekomendasi atau 7,03 persen dari total rekomendasi belum ditindaklanjuti senilai Rp82,31 miliar. Sedangkan sebanyak 52 rekomendasi atau 0,29 persen dari total rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan nilai Rp266,46 miliar.

Terkait tindak lanjut, Agung mengingatkan bahwa sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan pengganti Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi. Dengan penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut, seluruh entitas di lingkungan AKN I diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mudah dan cepat. “Karena berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti,” dia menegaskan.

## (AGUSTUS)

# Peran BPK dalam Mengawal SDGs

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) atau organisasi lembaga pemeriksa sedunia melalui kongres di Abu Dhabi pada 2016 sepakat mengawal program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara masing-masing. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu SAI (lembaga pemeriksa) yang menghadiri kongres tersebut dan berkomitmen mengawal SDGs di Tanah Air.

SDGs mengamanatkan 17 tujuan dengan 169 capaian.

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Beberapa tujuan di antaranya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, hingga mengatasi perubahan iklim. Pada prinsipnya, konsep pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga aspek: lingkungan, sosial, dan ekonomi. BPK sejak awal bahkan dilibatkan dalam merumuskan konsep dan tahapan pemeriksaan SDGs. INTOSAI kemudian menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs.

Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap *preparedness* atau persiapan suatu negara untuk menjalankan program SDGs. Kedua, memeriksa kinerja terhadap pelaksanaan program. Ketiga, memeriksa implementasi program dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Terakhir, menetapkan *role model* dalam penerapan SDGs di organisasi masing-masing.

BPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah pada semester I 2018 dalam menjalankan program SDGs. Pemeriksaan pada intinya bertujuan mengetahui sejauh mana persiapan pemerintah setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah Indonesia menjalankan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara High Level Political Forum on Sustainable Development Goals (HLPF on SDGs) pada 15-16 Juli 2019 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

HLPF merupakan forum yang memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota PBB untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam mereview dan menindaklanjuti agenda SDGs 2030. Pada tahun ini, terdapat 47 negara yang menyerahkan dan mempresentasikan laporan Voluntary National Reviews (VNR) atas pelaksanaan SDGs di negara mereka. Tujuh negara di antaranya, termasuk Indonesia, menyampaikan VNR mereka yang kedua.

Dalam HLPF tersebut, BPK RI mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara dalam salah satu Side Event yang diadakan, yaitu di VNR Lab 10 dengan topik “Engaging All Parts and Levels of Government.” Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang kala itu masih menjabat sebagai Anggota II - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara II dalam presentasinya menekankan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif

sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. BPK RI berperan mengawal pelaksanaan SDGs di Indonesia dengan kegiatan audit yang dilakukannya.

“Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia tahun lalu telah dilakukan Pemerintah RI dengan menerbitkan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019 lalu,” kata Agus.

Selain itu, Agus menyatakan bahwa BPK ke depannya tidak hanya akan menilai *output* dalam pemeriksaan SDGs di Indonesia, tetapi juga *outcome*.

## (SEPTEMBER)

# BPK Berstandar Internasional

Kiprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diakui di dunia internasional. Selain aktif di berbagai organisasi, BPK juga dipercaya menjadi pemeriksa eksternal lembaga internasional. Keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen BPK dalam menerapkan standar internasional.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Juska Meidy Enyke Sjam mengatakan, BPK mengadopsi dan mengadaptasi *best practice* di dunia internasional, mulai dari standar pemeriksaan hingga tata kelola organisasi. Terkait standar pemeriksaan, BPK mengacu pada standar pemeriksaan yang dikeluarkan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) bernama ISSAI (The International Standards of Supreme Audit Institutions).

“BPK mengadaptasi beberapa ISSAI ke dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan. BPK tidak mengadopsi secara utuh karena perlu dilakukan penyesuaian,” kata Juska.

Juska menjelaskan, standar internasional yang telah diadopsi salah satunya adalah ISSAI 100 yang dijadikan referensi dalam menyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Ada juga ISSAI 4000 dan 4100 yang dijadikan acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kepatuhan, hingga ISSAI 5110, 5120, 5130 sebagai rujukan menyusun seri panduan pemeriksaan berperspektif lingkungan. “ISSAI terkait pemeriksaan keuangan, hampir semua diperhatikan dalam pengembangan juklak dan juknis pemeriksaan keuangan. ISSAI juga jadi referensi penyusunan SPKN BPK,” kata Juska menambahkan.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri atas standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Setelah hampir sepuluh tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar pemeriksaan internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, SPKN 2007 perlu disempurnakan. Perkembangan standar pemeriksaan internasional saat ini mengarah kepada perubahan dari berbasis

pengaturan detail (*rule-based standards*) ke pengaturan berbasis prinsip (*principle-based standards*). INTOSAI kemudian ISSAI untuk menjadi referensi pengembangan standar bagi anggota INTOSAI.

Khusus untuk pemeriksaan keuangan, INTOSAI mengadopsi keseluruhan International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan International Federation of Accountants (IFAC). Seiring dengan perkembangan standar internasional tersebut, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2001 yang diberlakukan dalam SPKN 2007, juga mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA. Pada awal 2017, saat BPK genap

berusia 70 tahun, BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Sejak diundangkannya Peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan SPKN ini, diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara dapat lebih berkualitas. Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam hal tata kelola organisasi, BPK pun menerapkan framework atau kerangka kerja yang dibuat INTOSAI bernama SAI PMF (Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework).

Menurut Juska, ada banyak manfaat yang telah didapat BPK dengan penerapan standar internasional. “Kalau standarnya sudah diadopsi dan mengikuti standar internasional, berarti hasil kerja kita berstandar internasional. Dan bisa dibandingkan dengan SAI negara lain karena standarnya sama.”



Kalau standarnya sudah diadopsi dan mengikuti standar internasional, berarti hasil kerja kita berstandar internasional.

**(OKTOBER)**

# BPK Serahkan IHPS I 2019

BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019. Jumlah tersebut meliputi 7.236 (48 persen) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), 7.636 (51 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 93 (1 persen) permasalahan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

IHPS I 2019 disampaikan BPK kepada DPR, Presiden Joko Widodo, dan DPD pada medio September. Pada Selasa, 17 September 2019, BPK menyampaikan IHPS I 2019 secara langsung kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna DPR.

Dari 7.636 permasalahan ketidakpatuhan yang ada dalam IHPS I 2019, sebanyak 4.838 di antaranya atau 63 persen dari permasalahan dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp9,68 triliun. Selain itu, terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

"Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyeter ke kas negara/ daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar," kata Moermahadi Soerja Djanegara yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua BPK, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

IHPS I 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018.

Dalam pemeriksaan LKPP, BPK memeriksa 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018, sedangkan laporan keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 menunjukkan bahwa 81 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

LKKL yang memperoleh opini WTP telah mengalami peningkatan dari 65 persen atau sebanyak 56 LKKL pada 2015 menjadi 94 persen atau 82 LKKL pada 2018. Menurut Moermahadi, hal ini menunjukkan pemerintah telah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Renca-

na Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 95 persen pada 2019.

BPK juga memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau sebanyak 542 LKPD pada 2018. Dari 34 pemerintah provinsi, sebanyak 32 LKPD atau 94 persen telah memperoleh opini WTP dan 2 LKPD memperoleh opini WDP. Kemudian, dari 415 pemerintah kabupaten, sebanyak 327 LKPD atau 79 persennya telah memperoleh opini WTP, sebanyak 76 LKPD atau 18 persen memperoleh opini WDP, dan sebanyak 12 LKPD atau tiga persen memperoleh opini TMP. Selain itu, dari 93 pemerintah kota, sebanyak 84 LKPD atau 90 persen telah memperoleh opini WTP, sebanyak delapan LKPD atau 9 persen memperoleh opini WDP, dan sebanyak 1 LKPD atau 1 persen memperoleh opini TMP.

**(NOVEMBER)**

# Badan Baru, Semangat Baru

Susunan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berubah. Perubahan ini membawa semangat baru bagi BPK dalam mengawal keuangan negara. Agung Firman Sampurna dan Agus Joko Pramono resmi mengemban jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK se usai mengucapkan sumpah dan janji di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Pengambilan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam sidang Anggota BPK, Senin, 21 Oktober 2019. Agung Firman Sampurna menggantikan ketua BPK sebelumnya Moermahadi Soerja Djanegara yang masa jabatannya telah berakhir. Agung sebelumnya pernah menjadi Anggota III - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara III periode April 2012 hingga Juli 2013, Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V periode Juli 2013 hingga Oktober 2014, dan Anggota I - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I periode Oktober 2014 hingga Oktober 2019. Sedangkan Agus Joko Pramono pernah menjabat sebagai Anggota III - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara III periode Agustus 2013 hingga Oktober 2014 dan Anggota II - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara II periode Oktober 2014 hingga Oktober 2019.

Sebelumnya, lima anggota BPK terpilih periode jabatan 2019-2024 telah mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis (17/10). Dari lima Anggota BPK terpilih tersebut, dua di antaranya merupakan petahana, yakni Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis. Keduanya merupakan anggota BPK periode 2014-2019. Sementara itu, tiga anggota BPK terpilih lainnya merupakan anggota baru, yaitu Hendra Susanto, Pius Lustrilanang, dan Daniel Lumban Tobing. Sidang Anggota



BPK pada 21 Oktober 2019 juga menentukan pembagian tugas dan wewenang Anggota BPK. Hendra Susanto menjadi Anggota I - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I, Pius Lus-trilanang sebagai Anggota II - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara II, Achsanul Qosasi sebagai Anggota III - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara III, Isma Yatun sebagai Anggota IV - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara IV, Bahrullah Akbar sebagai Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V, Harry Azhar Azis sebagai Anggota VI - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara VI, dan Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota VII - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara VII.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, pertama kali dalam sejarah BPK, pemilihan ketua, wakil ketua, dan susunan anggota diputuskan secara aklamasi. Menurut Agung, hal itu menjadi modal kuat untuk BPK ke depan dalam melakukan pemeriksaan yang lebih berkualitas. "Tentunya mendorong pemeriksaan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan negara," kata Agung kepada wartawan.

Agung menekankan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat. Walaupun opini laporan keuangan dan tindak pidana korupsi tidak memiliki hubungan langsung, dia menegaskan BPK akan terus mendorong budaya akuntabilitas. "Mulai dari sekarang, kami akan melakukan pemeriksaan lebih ketat dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara," kata Agung.

Ketika ditanya mengenai kementerian/lembaga yang akan menjadi fokus ke depan, Agung menyebut seluruhnya akan terus diawasi BPK. Namun, Agung mengakui ada beberapa entitas yang memang memiliki risiko lebih tinggi seiring dengan semakin besar alokasi anggaran yang diberikan. Dia mengatakan, kementerian/lembaga yang memiliki anggaran besar antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Ke-

uangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian RI termasuk memiliki risiko tinggi karena mendapatkan anggaran yang besar. "Ya, dianggap sebagai kementerian yang memiliki risiko lebih tinggi," ujarnya.

Agung menambahkan, ia juga akan terus mendorong peran BPK di kancah internasional. Saat ini, ujar Agung, BPK terus berinteraksi secara intensif dengan dunia internasional sebagai anggota International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI). Dia mengatakan, BPK pada 2014 merupakan SAI yang menyusun salah satu standar pemeriksaan internasional, yaitu terkait pemeriksaan penggunaan dana bencana. Selain itu, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan terkait penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Kita aktif sekali dalam kegiatan internasional," kata Agung.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono berharap BPK dapat lebih berperan aktif dalam membantu negara mencapai tujuannya. Dia menyampaikan, hal itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diemban BPK untuk menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "BPK dalam melaksanakan amanat ini wajib melaksanakan aktivitasnya dengan berlandaskan independensi, integritas, profesionalitas, serta transparansi," kata Agus.

Agus mengatakan, BPK perlu menyatukan seluruh kemampuan dan kapabilitas dari semua insan BPK untuk mengarah ke satu titik yang sama. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Agus menyampaikan BPK akan menitik-beratkan pengembangan pada pembangunan yang bersifat jangka panjang. Sehingga, menurutnya, peran Badan Diklat PKN, Kaditama Revbang PKN, teknologi informasi, dan Inspektorat Utama (Itama) akan sangat diandalkan. ●



@humasbpkri.official



www.bpk.go.id



@bpkri



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



BPK RI Official



@bpkriofficial

**Tugas BPK**

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

# BPK Terpilih Jadi Pemeriksa Eksternal IMO



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono di Sidang Majelis IMO ke-31 di London.

Terpilihnya BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO tak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

**B**adan Pemeriksa Keuangan dipercaya menjadi *external auditor* atau pemeriksa eksternal (EA) International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2023. BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal dalam Sidang Majelis IMO ke-31 yang dilaksanakan di London, Inggris, Jumat (29/11),

BPK pun menjadi supreme audit institution (SAI) atau lembaga pemeriksa pertama di Asia

Tenggara yang dipilih menjadi pemeriksa eksternal IMO. Pencapaian ini semakin membanggakan karena BPK berhasil menyisihkan SAI Inggris dan Italia.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna menjelaskan, terpilihnya BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO tak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam waktu persiapan yang relatif singkat, Agung mengungkapkan, Indonesia berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya di mata dunia.

Selain itu, pencapaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang hebat jika bersatu dan bersinergi.



■ Ketua BPK, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan saat konferensi pers terpilihnya BPK sebagai Pemeriksa Eksternal IMO di Kantor Pusat BPK.

”

Walaupun kita berbeda, ada BPK, Kemenhub, Kemenlu, tapi pada saat kemudian kita memutuskan sebagai satu bangsa yang bersatu, kita bisa menghasilkan hal-hal yang tidak kita duga.

“Walaupun kita berbeda, ada BPK, Kemenhub, Kemenlu, tapi pada saat kemudian kita memutuskan sebagai satu bangsa yang bersatu, kita bisa menghasilkan hal-hal yang tidak kita duga,” kata Agung dalam konferensi pers di kantor pusat BPK RI, Jakarta, Sabtu (30/11).

Dengan dinobatkannya BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023, ia menilai hal ini membuat BPK semakin diakui dunia. Selain itu, keberhasilan itu juga menunjukkan keunggulan diplomasi Kemenlu dan kinerja Kemenhub. Sehingga, Indonesia mampu menyisihkan SAI dari dua negara maju yang ikut dalam pencalonan pemeriksa eksternal IMO.

Agung juga menyebut, akuntabilitas Indonesia akan semakin dipercaya di kancan internasional. Sebab, IMO telah memiliki sejarah panjang dalam bidang kemaritiman dunia. “Kita ingin memiliki peran yang lebih besar di dalam kegiatan International Maritime Organization,” tegasnya.

Dalam sidang majelis IMO untuk

memilih pemeriksa eksternal, Indonesia sudah unggul pada pemungutan suara putaran pertama. Indonesia meraih 64 suara, Inggris 55 suara, dan Italia 24 suara. Namun, jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya mayoritas suara, sehingga dilakukan pemungutan suara putaran ke-2. Pada putaran kedua, Indonesia memperoleh 75 suara dan Inggris 64 suara.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengungkapkan, Indonesia menominasikan BPK menjadi pemeriksa eksternal IMO dengan komitmen memberikan jasa audit berkualitas tinggi dan *cost-efficient* bagi IMO. Pencalonan sebagai pemeriksa eksternal IMO ini didasari oleh pengalaman BPK, yang saat ini masih menjadi *external auditor* International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 2016-2021, serta untuk International Anti Corruption Academy (IACA) tahun 2015-2016 dan 2018-2020.

Pencalonan BPK juga didasari oleh beberapa kelebihan yang dimiliki BPK sebagai lembaga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



BPK memiliki banyak pemeriksa dengan kualifikasi sertifikasi profesi Chartered Accountant, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, dan Certified Information System Auditor. BPK juga memiliki banyak pengalaman memeriksa/review sektor maritim nasional dan berpengalaman di lingkup komunitas SAI internasional.

Pengajuan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus merepresentasikan bangsa Indonesia. BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan bagi IMO untuk memilih BPK.

Dengan terpilihnya BPK, maka BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO dan dua institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI). Jasa pemeriksaan yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya pemeriksaan keuangan, namun juga pemeriksaan kinerja yang tidak ditawarkan oleh negara lain.

BPK selanjutnya akan mempersiapkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja tersebut. BPK akan berkoordinasi dengan manajemen IMO dan pemeriksa IMO sebelumnya yaitu dari SAI Ghana untuk perencanaan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan pendahuluan di tahun 2020. Pemeriksa BPK yang sudah berpengalaman dalam pemeriksaan IAEA akan dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja IMO.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, IMO dapat memberikan rekomendasi standar dan perbaikan dalam bidang maritim. Sehingga, sesuatu yang selama ini belum dimiliki Indonesia dapat diketahui.

Dengan adanya BPK di dalam IMO, Budi menuturkan, Indonesia dapat mengetahui lebih banyak dunia kemaritiman di negara maju. Meskipun enggan merinci ketertinggalan Indonesia, Budi mengatakan, kekurangan maupun ketertinggalan Indonesia di bidang maritim dapat ditekan.

"Jadi ada satu kolaborasi yang secara tidak langsung, BPK akan melakukan *mapping* seperti apa anggota-anggota itu dan kita bisa lakukan *improvement* untuk menentukan dunia maritim ke depan," ungkapnya.

Pihaknya juga akan menawarkan anggota terbaik untuk bekerja dalam International Maritime Organization (IMO). Diharapkan mereka dapat memantau dan mengetahui perkembangan maritim dunia.

Jika hal tersebut terwujud, Budi mengungkapkan, mereka dapat berkolaborasi dengan BPK. Dengan demikian, BPK dan Kemhub dapat terus bersinergi. "Kita ingin menjadi *partner* dari BPK untuk melakukan kegiatan audit," kata Budi.

Ia berharap masuknya BPK sebagai auditor eksternal IMO dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Sehingga, akan semakin banyak sesuatu yang dapat dipelajari dan diaplikasikan Indonesia. "Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dan kami banyak belajar dari apa yang tak diketahui," katanya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, keberhasilan BPK menjadi pemeriksa eksternal IMO menunjukkan kepercayaan internasional atas kualitas auditor Indonesia. Apalagi, BPK sebelumnya juga dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional lainnya, yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Anti Corruption Academy (IACA).

"Kemenangan ini adalah wujud penguatan peran Indonesia dalam organisasi yang tugas dan fungsi utamanya adalah untuk menjamin keselamatan pelayaran internasional," ujar Menlu Retno, Sabtu (30/11).

Ia menceritakan, Kemenlu menurunkan diplomat terbaik untuk melakukan negosiasi, sehingga Indonesia dapat meraih kesuksesan dalam Sidang Majelis IMO ke-31. Selain terpilihnya BPK sebagai pemeriksa eksternal, Indonesia juga terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020–2021.

Retno mengungkapkan, pihaknya bukan hanya melibatkan diplomat kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) di London, namun juga melibatkan diplomat senior dari Jakarta.

"Kita turunkan para diplomat senior kita yang dipimpin oleh Rachmat Budiman, Inspektur Jenderal Kemenlu untuk membantu lobi-lobi di lapangan menjelang pemilihan itu dilakukan," kata Retno.

Karena itu, ia menyatakan, Indonesia dapat meraih dua keberhasilan sekaligus. Retno menyatakan, keberhasilan itu juga tak terlepas dari kerja sama antara BPK dan Kemenhub. "Dan sekali lagi, karena kekompakan kita, kita menang," katanya.

Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961 dan masuk pertama kalinya menjadi Anggota Dewan pada tahun 1973. Sejak saat itu, Indonesia terus menunjukkan keseriusan di bidang maritim dengan terpilih menjadi anggota IMO selama periode 1973–1979 dan 1983–2019. ●



# BPK Bangun SDM Unggul

Prinsip pengelolaan SDM yang diacu BPK adalah manajemen SDM berbasis kompetensi. Jauh sebelum Kemenpan RB dan BKN menggaungkan soal manajemen Aparatur Sipil Negara, BPK sudah mulai melakukan transisi pengelolaan SDM secara profesional.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Kepala Biro SDM BPK Haedar mengatakan, BPK telah melakukan terobosan dalam pengelolaan SDM sejak

2009 yang ditandai dengan adanya Human Resources Management Plan (HRM Plan). Dalam dokumen strategis tersebut, BPK beralih dari pengelolaan SDM yang sifatnya administratif (Biro Kepegawaian) menjadi strategis (Biro SDM).

Prinsip pengelolaan SDM yang diacu BPK adalah manajemen SDM berbasis kompetensi. Jauh sebelum Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggaungkan soal manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), BPK sudah mulai melakukan transisi pengelolaan SDM secara profesional. "Apalagi saat itu sedang berlangsung momentum reformasi birokrasi yang mana BPK menjadi salah satu *pilot project* pemerintah," kata Haedar kepada *Warta Pemeriksa*.

la menjelaskan, Manajemen SDM berbasis kompetensi adalah suatu pengelolaan SDM yang menggunakan model kompetensi sebagai acuan manajemen pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi BPK. Artinya, pengelolaan pegawai mulai sejak pegawai BPK masuk, masa orientasi, unjuk kerja dan pengembangan, serta masa akhir tugas, menggunakan kompetensi sebagai dasar pengelolaan SDM secara profesional.

Oleh karena itu, BPK menyusun beban kerja, uraian jabatan, pola karier, pola mutasi, sistem remunerasi dan kesejahteraan, sistem penilaian dan pengembangan kompetensi, sistem penilaian kinerja, dan lainnya yang mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai.

Seiring berjalannya waktu, kata Haedar, dengan adanya ketentuan ASN (UU 5 Tahun 2014) dan manajemen PNS berdasarkan sistem merit (PP 11 Tahun 2017) yang diberlakukan Kemenpan RB, Biro SDM harus tangkas dalam menyikapi tuntutan perubahan yang ada. Misalnya, dengan turut serta aktif dalam penilaian reformasi birokrasi, penilaian sistem merit, pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) dan Jabatan Fungsional Lainnya (JFL), pengembangan sistem remunerasi yang baru, pola karier, pola mutasi, dan manajemen talenta.

“Besarnya harapan Biro SDM bahwa perubahan yang dilakukan secara berkelanjutan berdampak pada peningkatan SDM yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi BPK serta program “SDM Unggul, Indonesia Maju” pemerintah saat ini,” kata Haedar.

Haedar menambahkan, wujud komitmen BPK lainnya dalam membangun SDM unggul adalah dengan adanya standar kompetensi perilaku yang telah diberlakukan sejak 2009 (SK Sekjen Nomor 380 Tahun 2009) dan standar kompetensi teknis pemeriksa sejak 2011 (SK Sekjen Nomor 335 Tahun 2011), dan menjalankan Assessment Center mandiri sejak 2010.

Hingga saat ini, BPK menjadi *role*

*model* atau panutan bagi sejumlah instansi yang ingin mengembangkan sistem penilaian kompetensi maupun Assessment Center. Assessment Center BPK sering menjadi rujukan studi banding oleh instansi pemerintah lainnya seperti Kemendagri, Kementerian PU-PR, Sekretariat Negara, Komisi Yudisial, dan Kementerian ESDM. BPK bahkan pernah meraih penghargaan dari BKN sebagai instansi dengan Implementasi Assessment Center Terbaik pada anugerah BKN Award tahun 2016.

Proses asesmen BPK dilakukan untuk pejabat Eselon I, II, III, IV, dan JFP. Khusus JFP, proses asesmen menjadi salah satu pertimbangan dalam mekanisme sertifikasi peran pemeriksa. Selama ini, fokus proses asesmen adalah untuk penilaian kompetensi manajerial. Namun, Biro SDM bekerja sama dengan Badan Diklat melangsungkan proses asesmen kompetensi teknis untuk pemeriksa sejak 2015.

“Bahkan, mulai 2019 proses asesmen juga dilakukan untuk mendukung pemetaan kompetensi Eselon IV dalam mendukung program manajemen talenta,” ujar Haedar.

Proses asesmen yang dilakukan di BPK menggunakan metode psikotes (psikologi umum) maupun *assessment center*. Alat-alat ukur yang digunakan dalam proses asesmen meliputi tes potensi kognitif, tes preferensi kepribadian, simulasi *in-tray*, simulasi *leaderless group discussion*, dan wawancara kompetensi. Asesor yang melakukan proses asesmen adalah para asesor yang telah tersertifikasi oleh BKN maupun lembaga sertifikasi Assessment Center nasional, berpengalaman, serta memiliki wawasan memadai mengenai proses bisnis BPK.

Dengan terbitnya standar kompetensi jabatan PNS (Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017), BPK sedang menyelaraskan standar kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis, serta mengembangkan alat ukur asesmen dan rekomendasi hasil asesmen. BPK juga secara berkelanjutan mengembangkan alat ukur penilaian

kompetensi maupun mengembangkan kemampuan asesor BPK untuk menjaga kualitas proses asesmen.

Saat ini, Biro SDM sedang mengembangkan Assessment Center BPK dalam rangka pemerolehan akreditasi nasional Assessment Center dari BKN dan potensi PNBK. Dengan demikian, Assessment Center BPK dapat memberi nilai tambah bagi organisasi dan kompetitif dengan lembaga penyedia jasa asesmen lainnya.

Hingga tahun 2018, ujar Haedar, jumlah pegawai BPK yang sudah *assessed* secara kumulatif mencapai 5.474 orang. Tidak berhenti pada proses asesmen, BPK juga mendorong disusunnya Aktivitas Pengembangan Individu (API) berdasarkan hasil proses asesmen. API ini kemudian dikelola oleh Biro SDM dan Badan Diklat untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

### Jabatan fungsional pemeriksa

Kemenpan RB telah menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) yang berlaku sejak 10 Oktober 2018 dan mencabut pemberlakuan Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2010 tentang JFP berikut perubahannya. Dengan adanya permenpan tersebut, terjadi perubahan dalam manajemen JFP di BPK, khususnya terkait perubahan basis karier JFP dari berbasis peran ke berbasis jabatan dan perluasan pemberlakuan JFP.

Perubahan JFP itu memiliki implikasi yang cukup besar terhadap pengaturan SDM Pemeriksa di BPK, sehingga diperlukan adanya penyesuaian/penyempurnaan perangkat/subsistem implementasi JFP mengenai uraian jabatan pemeriksa, formasi jabatan pemeriksa, standar kompetensi JFP, dan mekanisme uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan Jabatan, yang meliputi penyesuaian kurikulum diklat perjenjangan JFP dan *tools assessment* (penilaian kompetensi) JFP. Selain itu, terjadi perubahan terkait manajemen kinerja (standar teknis kegiatan, SKP,

dan atasan PFP), penetapan kelas jabatan/grading JFP (dasar pembayaran remunerasi baik Tunjangan Kinerja maupun TPT) dan penetapan aturan peralihan/transisi JFP.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam penyusunan perangkat/subsistem tersebut, Sekjen BPK menetapkan pembentukan Tim Pokja JFP yang beranggotakan unsur-unsur Biro SDM, Direktorat Litbang, Badan Diklat, dan Ditama Binbangkum. Pada tahun ini, Tim Pokja JFP telah menyelesaikan penyusunan peraturan transisi JFP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekjen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerapan Peraturan Menpan RB Nomor 49 Tahun 2019 tentang JFP dalam Masa Transisi.

Peraturan tersebut antara lain mengatur mengenai transisi berkaitan peran JFP, periode *cut off* penilaian angka kredit JFP, manajemen kinerja JFP, pengangkatan dalam JFP bagi pegawai pada satker perluasan JFP, penyesuaian nomenklatur JFP, dan pemeriksa yang belum memiliki ijazah sarjana.

Perubahan JFP juga berdampak pada terjadinya ketidakselarasan antara kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 49 Tahun 2018 dengan kompetensi para pemangku JFP saat ini, terutama pada jenjang Pemeriksa Ahli Muda dan Pemeriksa Ahli Madya. Berkaitan dengan hal tersebut, Sidang BPK XVII Tahun 2019 memberi arahan agar dilaksanakan kegiatan penyelerasan kompetensi melalui *crash program* bagi para Pemeriksa Ahli Muda dan Ahli Madya yang belum memenuhi kompetensi jabatan tersebut.

Peserta *crash program* adalah para Pemeriksa Ahli Madya yang belum memiliki Surat Tanda Sertifikasi Peran (STSP) Pengendali Teknis (PT) dan Pemeriksa Ahli Muda yang belum memiliki STSP Ketua Tim Junior (KTY). *Crash program* dilaksanakan melalui kegiatan belajar mandiri, diklat *crash program*, dan/atau uji kompetensi dengan menggunakan Computer-Assisted Test (CAT).



Biro SDM berperan menyiapkan data pemangku JFP yang harus mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan untuk penyelenggaraannya difasilitasi oleh Badan Diklat PKN. *Crash program* JFP telah selesai dilaksanakan pada Oktober dan November 2019. Saat ini, Biro SDM sedang melakukan analisis dan penelaahan atas hasil uji CAT yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi Tim Penilai Kinerja (TPK) dalam mengevaluasi jabatan para pemangku JFP.

### Sistem merit

Sesuai definisinya pada UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh instansi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Sistem merit sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan SDM yang berkualitas, yaitu ASN yang kompeten, netral, berintegritas, dan berkinerja tinggi, sehingga mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, serta bersih dan akuntabel.

Haedar menjelaskan, tingkat pe-

nerapan sistem merit pada instansi dikategorikan menjadi empat, yaitu sangat baik, baik, kurang, dan buruk. Salah satu *reward* dari penerapan sistem merit bagi instansi adalah adanya pengecualian pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan seleksi terbuka (selama 2 tahun untuk kategori sangat baik atau 1 tahun untuk kategori baik).

“Pengisian JPT, jabatan pengawas dan jabatan administrasi nantinya dilakukan melalui manajemen talenta atau rencana sukses instansi bersangkutan,” ujarnya.

Sesuai Permenpan 40/2018, tahapan penerapan sistem merit ada 5 tahap, dimulai dari penyusunan *road map* penerapan sistem merit; pembentukan tim penilai mandiri sistem merit pada masing-masing instansi (*self assessment*), penetapan penilaian tingkat penerapan sistem oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara); pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian; dan pengawasan serta evaluasi dampak penerapan sistem merit.

“Saat ini, kita sedang berada pada tahap verifikasi oleh KASN. Tim Penilai Mandiri mengusulkan penilaian dalam kategori “sangat baik”. Semoga dalam penerapannya oleh KASN pada Desember, kita bisa memperoleh hasil yang kita harapkan,” kata Haedar. ●

# Upaya BPK Memperkuat Manajemen Risiko dan Pengendalian Mutu



■ Inspektur Utama Ida Sundari

Pada 2020, Inspektorat Utama akan melakukan *review* terkait implementasi manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah implementasinya sudah berjalan baik atau masih ada kendala.

Inspektur Utama Ida Sundari mengatakan Inspektorat Utama (Itama) terus menjalankan manajemen perubahan. Perubahan signifikan yang dilakukan terkait yaitu manajemen risiko dan membangun pengendalian mutu.

Ia menjelaskan, manajemen risiko sudah

dibangun sejak akhir 2018 sampai terbitnya Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko. “Kami juga menerbitkan buku profil risiko seluruh satuan kerja dan BPK Wide. Pada 2019 ini mulai diimplementasikan seluruh Satuan Kerja dan sebagai *leading sector* adalah Kaditama Revbang,” kata Ida.

Itama berperan aktif mendampingi jalannya pengimplementasian manajemen risiko. Pengelolaannya pun akan terus dikawal. "Tak hanya pendampingan, kami juga terus memberikan *awareness* kepada satuan kerja, khususnya mitigasi yang telah dijalankan dalam implementasi manajemen risiko," ungkap dia.

Sebagai *leading sector*, Ditama Revbang juga telah membuat laporan Semester I 2019. Laporan ini bertujuan untuk melihat kembali implementasi manajemen risiko yang telah dijalankan satuan kerja.

Sementara pada 2020, Itama akan melakukan *review* terkait implementasi manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah implementasinya sudah berjalan baik atau masih ada kendala. "Kemudian, untuk mengetahui profil risiko di satuan kerja apakah berkurang atau malah hilang sama sekali. *Review* juga penting karena rencananya satuan kerja yang memiliki mitigasi terbaik akan dijadikan *best practice* dan dibagikan kepada satker lainnya," kata dia.

Terkait dengan sistem pengendalian mutu, BPK selalu ingin mengembangkan pedoman yang bisa menjadi acuan seluruh satuan kerja. Saat ini, Itama telah memiliki pedoman pengendalian mutu yang terdiri atas sembilan pilar untuk menilai sejauh mana kinerja dari BPK.

"Dari sembilan itu, delapan terkait dengan pilar kelembagaan dan satu pilar pemeriksaan," ucap dia.

Terkait pilar ini, pimpinan BPK periode sebelumnya menginginkan pilar tersebut juga bersinkronisasi dengan standar internasional, dimana tak lagi sembilan pilar, melainkan menjadi enam pilar.

Pilar tersebut sesuai dengan ISSAI 40 (yang telah diubah menjadi ISSAI 140). "Ini sedang kita susun dan bicarakan dengan eselon I. Hanya saja terkait sistem pengendalian mutu ini, kami tidak bisa murni menggunakan ISSAI 140. Alasannya kita perlu menambahkan prinsip-prinsip yang tak tercantum dalam ISSAI 140," ucap dia.

Ia menyontohkan seperti Intosai-P 10 yang terkait independensi dan Intosai-P 20 terkait akuntabilitas dan transparansi. Independensi, akuntabilitas, dan transparansi, tutur Ida, akan dimasukkan ke dalam standar BPK. "Kami usulkan menjadi 'PITA-PM', P kepanjangannya prinsip, 'I' artinya indepen-



Tak hanya pendampingan, kami juga terus memberikan *awareness* kepada satuan kerja, khususnya mitigasi yang telah dijalankan dalam implementasi manajemen risiko.

densi, 'T; sebagai transparansi, 'A; maksudnya akuntabilitas, dan 'PM' pengendalian mutu sehingga disingkat PITA-PM," tutur dia.

Karena standardisasi ini mengikuti internasional, maka indikator pengukurannya juga menggunakan SAI Performance Measurement Framework. Ini menjadi alat untuk mengukur kinerja PITA dan standar manajemen mutu. "Selain manajemen risiko dan pengendalian mutu, sebenarnya ada pula sistem pengendalian internal yang juga baru pertama kali diasess oleh pihak eksternal di 2019," tutur dia.

Sementara itu terkait zona integritas, seluruh satuan kerja telah diundang untuk menandatangani zona integritas di mana keberhasilannya mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani). Berdasarkan aturan Kemenpan-RB, Itama memiliki posisi sebagai penggerak, pendamping, dan memberikan bimbingan teknis bagi para satker pembangun ZI.

"Kami terus mendampingi satker untuk meraih WBK dan bila sudah meraih pun akan dilanjutkan menuju ke WBBM," ucap dia. Bila semuanya belum tercapai, Itama bakal melakukan jemput bola ke Kementerian PAN-RB untuk mengetahui alasan, kekurangan dan capaian terakhir satker-satker BPK.

Dengan demikian, tegas dia, Itama dalam hal zona integritas terus memfasilitasi dan mendorong satker sambil berkoordinasi dengan Kemenpan-RB. Hingga saat ini, menurut dia, sudah ada 12 satuan kerja yang meraih WBK dan satu yang mendapat WBBM. Dan pada 9 Desember 2010 sebagai Hari Anti Korupsi, BPK memperoleh tambahan predikat WBK untuk 3 satker. ●

# Evolusi Badan Diklat BPK

Saat ini, Badiklat tak hanya melakukan pendidikan dan pelatihan, namun juga sertifikasi, akreditasi, dan pembimbingan

**B**PK memiliki komitmen yang sangat besar dalam mengembangkan SDM. Atas alasan itulah, BPK terus memperkuat keberadaan dan fungsi pendidikan dan pelatihan. “Badiklat telah menjalani evolusi yang berlangsung lama,” tutur Kepala Badiklat PKN Hery Subowo kepada *Warta Pemeriksa*. Ia mengatakan, awalnya badan ini hanya berupa Bagian Diklat di bawah Biro Kepegawaian. Kemudian karena menilai pentingnya diklat untuk kompetensi pegawai, BPK meningkatkan struktur organisasinya menjadi Pusat Pendidikan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai BPK. Pusdiklat awalnya menempati Kantor Pusat BPK dan selanjutnya pada tahun

2007 Pusdiklat berpindah ke Kalibata. Pada September 2017, Pusdiklat ditingkatkan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Menurut Hery, paling tidak ada empat aspek yang mengalami perubahan dengan berdirinya Badiklat. Pertama dari tugas dan fungsi, sebelumnya Pusdiklat hanya menyelenggarakan diklat namun kini Badiklat juga menyelenggarakan sertifikasi, akreditasi dan pembimbingan. Kedua dari cakupan layanan, sebelumnya Pusdiklat hanya memberikan diklat kepada pegawai BPK, namun kini Badiklat melayani semua pihak yang ingin belajar mengenai Pemeriksaan Keuangan Negara baik internal maupun eksternal BPK. Ketiga dari area pelayanan, dulu Pusdiklat hanya melayani *stakeholder* dalam negeri, tetapi kini Badiklat diharapkan juga menjadi tempat belajar bagi kolega internasional. Keempat, perubahan struktur organisasi dari Pusat



■ Kepala Badiklat PKN Hery Subowo

(Eselon II) menjadi Badan (Eselon I) sebagai implikasi dari tiga aspek perubahan tersebut. “Dulu saat Pusdiklat sebenarnya sudah ada diklat eksternal bahkan internasional, hanya saja sifatnya sporadis dan dilakukan bila ada permintaan dan kelebihan kapasitas. Kini bahkan kami menargetkan untuk memenuhi kebutuhan diklat APIP, KAP, dan auditor BPK negara lain,” kata Hery.

Hery menambahkan, Badiklat PKN memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Hal ini ditunjang dengan mandat BPK yang sangat kuat dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang juga berlaku bagi pihak lain yang memeriksa Keuangan Negara. Faktor lainnya adalah BPK sudah sering berpartisipasi dalam kegiatan internasional. Artinya, keunggulan BPK diakui secara internasional. Kendati demikian, BPK dan Badiklat belum sepenuhnya mandiri. Saat ini bila ingin melakukan perubahan struktur organisasi harus berkonsultasi kepada KemenpanRB. Tantangan lain adalah SDM yang dimiliki Badiklat. Ia mengatakan, saat ini cukup sulit untuk menambah Widyaiswara. Padahal, *core business* Badiklat adalah mengajar. “Apabila lingkungannya begitu luas, namun Widyaiswara jumlahnya kurang, maka Badiklat akan sulit berkembang” jelasnya. Saat ini BPK memiliki 16 widyaiswara aktif untuk melayani diklat di internal BPK, maupun permintaan dari pihak luar seperti inspektorat dari provinsi/ kabupaten/kota. “Hitung-hitungannya, saat menjadi pusdiklat kami memiliki *internal customer* 7 ribu orang, sedangkan dengan menjadi Badiklat maka *potential customer* internal maupun eksternal kami mencapai sekitar 15 ribu orang,” ucap Hery. Berdasarkan angka potensial tersebut, Badiklat seharusnya memiliki lebih banyak widyaiswara.

Kendati demikian, ujar dia, Badiklat memiliki kekuatan pada akreditasi diklat. “Saat ini, Badiklat PKN memiliki akreditasi Diklatpim III dan IV dari Lembaga Administrasi Negara. Bahkan cukup sering Kementerian/Lembaga/Pemda menitipkan peserta diklatpim ke Badiklat,” tuturnya. Badiklat juga memiliki modul yang cukup lengkap dan sudah merumuskan konsep *Excellence Learning Center*. Proses inovasi dan kreatif juga sudah dijalankan melalui Simposium Inovasi Pembelajaran bagi pegawai di satuan kerja. Inovasi ini terbukti memengaruhi proses di satuan kerja. Saat ini, Badiklat sedang mengusulkan perubahan struktur organisasi. “Awalnya ada dua pusat, tapi kini kami mengusulkan menjadi tiga pusat. Kami mendorong ada satu pusat lagi, jadi fungsi kediklatan itu dibagi menjadi Pusat Perencanaan dan Pengolahan Data,

Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi serta Pusat Evaluasi dan Pengembangan. Selain itu balai diklat juga akan ditambah. Di Bali akan ada Balai Diklat yang secara khusus menyelenggarakan *training* internasional. Sementara di Jakarta akan menjadi Balai Diklat Jakarta.” Hery menjelaskan.

Badiklat kini tengah menyusun rencana strategis bersamaan dengan penyusunan Renstra BPK 2020-2024. Dalam rencana strategis itu, Badiklat merencanakan bentuk ideal ke depannya. Hery menargetkan Badiklat untuk menjadi *Center of Excellence* dalam pemeriksaan keuangan negara. Sebagai *Center of Excellence*, Badiklat harus mampu menyelenggarakan diklat yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya. Menurutnya, penyelenggaraan diklat dapat dinilai berkualitas jika didukung dengan fasilitator widyaiswara dan mumpuni di bidangnya, berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif dan dikelola dengan manajemen kegiatan kediklatan yang profesional. Hery menambahkan, diklat akan bermanfaat jika dapat memfasilitasi proses pembelajaran peserta diklat, serta meningkatkan kompetensi peserta pascadiklat dan berdampak pada perbaikan kinerja satker dan BPK. Dijelaskannya pula bahwa Badiklat dapat menjadi lembaga terpercaya jika telah mampu menjadi tempat penyemaian nilai dasar IIP BPK, rujukan pembelajaran di bidang pemeriksaan keuangan negara dan *role model* bagi pengelolaan lembaga kediklatan.

Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, Hery menjelaskan lima inisiatif strategis yang dicanangkan Badiklat. Menurutnya Badiklat perlu meningkatkan kapasitas SDM fasilitator, antara lain, melalui *refreshment audit* bagi Widyaiswara, tambahan jam pimpinan dalam diklat, dan pembentukan *international training specialist*. Dia menambahkan Badiklat perlu merancang kurikulum dan metode yang *link and match* dengan kebutuhan *user* melalui strategi *on the job training*, melaksanakan *coaching* dan *mentoring* serta pengelolaan *community of practices*. Selain itu, Badiklat perlu menyiapkan media pembelajaran yang paripurna antara lain melalui pemanfaatan laboratorium audit, metode *blended learning*, dan penyelenggaraan *Computer Assisted Test*. Peningkatan sinergi dengan *stakeholder* juga perlu dilakukan Badiklat antara lain melalui *Training Need Assessment*, *Y-1 Training Schedule*, dan Evaluasi Level 3-4 serta *Better Practice Guide* kediklatan. “Dan terakhir, Badiklat perlu memperbaiki tata kelola organisasi antara lain melalui penyempurnaan SOP kediklatan, penyempurnaan SOTK, dan rekrutmen WI permanen”, pungkasnya. ●



# IDI-ASOSAI Review LHP Kesiapan Implementasi SDGs

Hasil *review* akan menjadi masukan bagi pemeriksaan kinerja BPK terkait SDGs.

**W**akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Agus Joko Pramono menerima kunjungan kehormatan dari tim *reviewer* program IDI-ASOSAI Cooperative Audit on Preparedness for Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam kesempatan itu, Agus didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Auditor Utama Keuangan Negara II Laode Nusriadi, dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Slamet Kurniawan. Sementara, tim *reviewer* terdiri atas



■ Penerimaan tim review program IDI-ASOSAI di Kantor Pusat BPK RI.

Matulee Yokee dari Supreme Audit Institution (SAI) Thailand dan David Doe Amediku dari SAI Ghana pada Rabu, (13/11) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Kunjungan ini bertujuan mengulas *quality assurance* (QA) hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK atas kesiapan implementasi penca-

paian pembangunan berkelanjutan Pemerintah Republik Indonesia pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya dalam periode 2016 hingga semester I 2018.

*Review* atau ulasan itu dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian pemeriksaan yang telah dilakukan BPK dengan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs).

Kegiatan itu dilakukan selama tiga hari mulai dari 11 hingga 13 November 2019. Tim *reviewer* dan tim pemeriksa Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) 2 BPK yang menjadi pemegang portofolio audit terhadap SDGs melakukan diskusi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit yang telah dilaksanakan.

Hasil ulasan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemeriksaan kinerja BPK terkait SDGs di masa mendatang. ●



■ Wakil Ketua BPK memberi kenang-kenangan kepada tim *reviewer* dari SAI Thailand dan SAI Ghana.

# BPK Berbagi Ilmu dengan CAG Zanzibar

Dalam diskusi itu, ia berharap Indonesia bisa berbagi ilmu khususnya dalam hal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (SDGs). Alasannya, sebagai lembaga pemeriksa negara, CAG Zanzibar belum memiliki aturan atau pedoman terkait pemeriksaan SDGs.

**B**adan Pemeriksa Keuangan menggelar diskusi dengan Supreme Audit Institution (SAI) atau Office of The Controller and Auditor General (CAG) of Zanzibar, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Denpasar, Oktober lalu.

Diskusi antarlembaga ini diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Juska Meidy Enyke Sjam dan Ketua CAG Zanzibar Fatma Mohamed Said.

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional BPK Wahyudi yang menjadi moderator dalam diskusi panel itu mengatakan, pertemuan ini digelar dalam rangka memperat hubungan

kedua negara, dan berbagi ilmu. "Ini adalah silaturahmi antar dua lembaga dimana berbagi ilmu dan pengalaman," ucap dia.

Wahyudi mengatakan BPK adalah lembaga independen negara. Independensi BPK terlihat pada kebijakan yang tak boleh diintervensi baik oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Hasil pemeriksaan BPK bersifat tetap dan tak boleh dicampuri lembaga eksekutif. Tak hanya diintervensi, BPK juga tak bisa dipengaruhi hasil penilaiannya sekalipun," ungkap dia.

Hal ini karena BPK RI bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sehingga, posisi BPK setara dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.



■ Diskusi antara BPK RI dengan CAG Zanzibar tentang tugas masing-masing lembaga.

”

Hasil pemeriksaan BPK bersifat tetap dan tak boleh dicampuri lembaga eksekutif. Tak hanya diintervensi, BPK juga tak bisa dipengaruhi hasil penilaiannya sekalipun.



■ Delegasi CAG Zanzibar memberi kenang-kenangan miniatur Zanzibar Door untuk BPK.

Sementara itu, Fatma Mohamed menyampaikan bahwa CAG Zanzibar dibentuk sejak 1964. CAG Zanzibar memiliki mandat langsung dari UU Zanzibar 1984 pasal ke 112.

“Sejauh ini CAG bertugas untuk meningkatkan tanggung jawab dan transparansi dari penggunaan sumber daya publik oleh negara, yang mana berdasarkan mandat dari dewan perwakilan,” ungkap dia.

Ia bahkan sempat menjelaskan bahwa hasil audit dari CAG akan dibahas langsung oleh Presiden Zanzibar dan Ketua Dewan Revolusioner bersama kabinet. Hal ini, ucap dia, agar bisa lebih tepat menghasilkan solusi bagi hasil pemeriksaan penggunaan sumber daya publik oleh negara.

Ia menambahkan, CAG Zanzibar sangat mengapresiasi terselenggaranya diskusi karena dapat belajar dari BPK dalam hal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ia mengungkapkan, sebagai lembaga pemeriksa negara, CAG Zanzibar belum memiliki aturan atau pedoman terkait pemeriksaan SDGs.

“Kami berharap Indonesia bisa berbagi ilmu termasuk dalam pemeriksaan, seperti audit pemeriksaan untuk sumber daya energi dan SDGs,” ucap dia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menggelar Konferensi Internasional ten-

tang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendorong SDGs. Konferensi ini merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Konferensi ini juga memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan negara untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Berdasarkan arahan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), tiap negara didorong melakukan dan mengawal penerapan SDGs di masing-masing negara.

Konferensi ini digelar berdasarkan pengalaman BPK RI dalam berkontribusi secara strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemeriksaan. BPK RI pada 2016 bergabung dengan INTOSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) dan INTOSAI Development Initiative (IDI) pada program pengembangan kapasitas pemeriksaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, BPK RI melakukan pemeriksaan atas kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada Juli 2019 pada forum INTOSAI KSC, IDI, dan UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). ●

# BPK Hadiri Sidang Tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal PBB



■ Anggota VI - Pimpinan AKN VI BPK, Harry Azhar Azis dan Sekjen BPK, Bahtiar Arif.

Panel Pemeriksa Eksternal PBB merupakan forum para pemeriksa eksternal PBB yang bersifat independen.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri sidang tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-60 pada 2-3 Desember 2019. Dalam sidang yang dilaksanakan di Kampus PBB Bonn, Jerman ini, BPK hadir sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA).

Panel Pemeriksa Eksternal PBB merupakan forum para pemeriksa eksternal PBB yang bersifat independen. Panel ini terdiri atas 11 ketua badan pemeriksa keuangan dari 11 negara yang melakukan pemeriksaan pada sekretariat PBB, dana, program, dan lembaga khusus PBB, serta IAEA.

Sebelas negara Anggota Panel Pemeriksa Eksternal PBB adalah Kanada, Chile, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Ghana, Filipina, Swiss, Inggris, dan Tanzania sebagai pengamat. Pertemuan ke-60 Panel Auditor Eksternal ini diketuai oleh Gareth Davies, comptroller and auditor general of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Di dalam pertemuan ke-60 ini, mewakili BPK adalah Anggota VI - Pimpinan AKN VI BPK Harry Azhar Azis yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif. Pada pertemuan tersebut, BPK dan anggota panel lainnya berbagi informasi dan metodologi untuk lebih mengembangkan serta meningkatkan nilai dan kualitas proses pemerolehan keyakinan mutu.

Panel Pemeriksa Eksternal PBB berupaya untuk memasti-

kan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan memberikan dasar yang transparan dan akurat. Sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan yang dibuat oleh PBB, *specialized agencies*, dan IAEA.

Pertemuan ke-60 ini membahas agenda reformasi sekretaris jenderal. Termasuk juga dampak perubahannya pada tata kelola, perkembangan dalam pencegahan dan langkah deteksi kecurangan, peluang untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan mitra pelaksana, serta interaksi panel dengan sistem PBB yang lebih luas. Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Surat Panel Pemeriksa Eksternal kepada Sekjen PBB tanggal 3 Desember 2019.

Panel juga bertemu dengan Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal untuk Reformasi Jens Wandel dan Asisten Sekretaris Jenderal Kantor Koordinasi Pembangunan Robert Piper. Pertemuan itu untuk membahas agenda reformasi sekretaris jenderal.

Selain itu, Panel bertemu dengan Wakil Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Layanan Proyek Vitaly Vanshelboim, Direktur Senior Koordinasi Kebijakan dan Program dari Sekretariat PBB untuk Perubahan Iklim Martin Frick, dan Direktur Manajemen Layanan Relawan PBB Andrey Pogrebnyak. Pertemuan itu untuk memahami tantangan program dalam pelaksanaan mandat mereka.

Dalam pertemuan Panel Pemeriksa Eksternal PBB tersebut, anggota VI - Pimpinan AKN VI BPK dan sekjen BPK didampingi delegasi yang sebelumnya telah mengikuti pertemuan kelompok teknis selama tiga hari, yaitu sejak 27-29 November 2019. Mereka bertemu untuk membahas dan merumuskan bahan Sidang Panel Pemeriksa Eksternal. ●



■ Suasana Sidang Tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal PBB di Kampus PBB Bonn, Jerman.

# BPK Sampaikan Hasil Pemeriksaan Kinerja IAEA 2019

IAEA mengapresiasi pemeriksaan kinerja oleh tim BPK.

**A**nggota IV - Pimpinan Auditorat Keuangan (AKN) IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun memimpin *Exit Meeting* atas Pemeriksaan Kinerja Badan Energi Atom Dunia (International Atomic Energy Agency/IAEA) Tahun 2019 terkait Lingkup Perlindungan Nuklir pada Jumat (15/11) di Vienna International Center, Austria.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota IV - Pimpinan AKN IV didampingi oleh I Gede Sudi Adnyana dan Fitriyah, masing-masing sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja, beserta anggota tim, yaitu Anne R Sitorus, Dini F Mariani, Budi Setiawan, Bulkhaira, dan Rakhmat L Mosii.

Sementara itu, dari pihak IAEA dipimpin oleh Massimo Aparo selaku Deputy Perlindungan Nuklir dan juga dihadiri oleh Fred Claude dan Sinisa Gligic, serta Tristan Bauswein masing-masing dari Bidang Evaluasi dan Divisi Keuangan.

Anggota IV - Pimpinan AKN IV menyampaikan, pemeriksaan BPK



■ Foto bersama Anggota IV - Pimpinan AKN IV, tim pemeriksa IAEA dan perwakilan IAEA.

telah berpedoman pada International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penunjang perlindungan guna memperkuat upaya perlindungan nuklir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa entitas telah mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang juga menjadi area kunci pemeriksaan BPK. Hal itu meliputi konsep dan perencanaan, implementasi perlindungan, analisis informasi, evaluasi efektivitas, serta kaitannya dengan penyediaan SDM dan pengkoordinasian penerapan nuklir sehingga dapat memberikan manfaat kepada para negara anggota.

Tanpa mengurangi pencapaian dimaksud, Anggota IV - Pimpinan AKN

IV juga menegaskan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, antara lain kewajiban berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong perjanjian upaya perlindungan nuklir dalam meningkatkan hasil jangkauannya atau *outcome's outreach* secara keseluruhan. Utamanya terkait simpulan perjanjian perlindungan dan protokol tambahan. Kemudian, pentingnya peningkatan kesadaran negara anggota untuk menetapkan akuntansi material nuklir, dan perlunya peningkatan perangkat pemantauan untuk memperoleh data yang lebih baik sebagai dasar analisis kebutuhan pelatihan pada entitas, utamanya dalam lingkup sistem manajemen pembelajaran.

Atas hasil pemeriksaan yang disampaikan tersebut, entitas mengapresiasi pemeriksaan kinerja oleh tim BPK atas hal pokok yang bersifat sensitif dan rahasia dengan memberikan tanggapan positif atas temuan serta usulan rekomendasi yang diberikan. Pada akhir pertemuan, Anggota IV - Pimpinan AKN IV juga mengucapkan terima kasih kepada entitas atas komunikasi yang telah berjalan baik dan kepercayaan yang diberikan selama pemeriksaan berlangsung. ●



■ Suasana *Exit Meeting*.



■ Ketua BPK dan Deputy Auditor General SAV Vietnam.



■ Anggota IV - Pimpinan Auditorat Keuangan IV dan Deputy Auditor General SAV Vietnam.

# BPK Bantu SAI Vietnam Kembangkan Organisasi

Kunjungan ini merupakan implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan SAV yang telah berlangsung selama delapan tahun.

**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna didampingi Anggota IV - Pimpinan Auditorat Keuangan IV Isma Yatun menerima delegasi dari State Audit Office of Vietnam (SAV) yang dipimpin oleh Deputy Auditor General, Nguyen Quang Thanh dalam *courtesy meeting* di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (25/11).

*Courtesy meeting* ini merupakan acara pembuka dari rangkaian kegiatan *study visit* SAV ke BPK yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 25 hingga 27 November 2019 di Kantor Pusat BPK dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, di Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan SAV kepada BPK untuk menjadi mitra dalam pengembangan organisasi melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai SAV dalam beberapa kegiatan antara lain *technical assistance*, *secondment*, *training* dan *workshop* di berbagai topik yaitu pemeriksaan kinerja, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan infrastruktur, dan pengembangan pedoman audit.

Ketua BPK berharap *study visit* ini dapat menjadi momentum yang baik bagi SAV untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait praktik yang telah dilakukan BPK. Kunjungan ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan serta *lessons learned* yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran ke depan.



■ Foto bersama Pimpinan BPK RI dan SAV Vietnam.

Sementara itu, Deputy Auditor General SAV mengungkapkan rasa terima kasih atas kesediaan BPK untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, khususnya dalam pemeriksaan sektor publik. Ia yakin ke depan, BPK dan SAV dapat terus bekerja sama dan saling mendukung dalam peningkatan kapasitas pemeriksa masing-masing.

Hadir dalam *courtesy meeting* tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK, perwakilan dari The European Union Public Finance Modernisation Project (EUPFMO) serta perwakilan dari Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta.

*Study visit* ini merupakan implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan SAV di bidang pengembangan pemeriksaan keuangan, kinerja dan kapasitas organisasi yang telah berlangsung lebih dari delapan tahun.

Dalam *study visit* selama tiga hari tersebut, topik yang dibahas adalah *strategic audit planning*, *risk based approaches in audit*, *audit quality control and quality assurance*, *post-audit follow up*, *IT to support audit* serta *human resource and training management*. ●

# BPK RI dan BPK Arab Saudi Teken MoU

Kerja sama yang dijalin meliputi bidang peningkatan SDM melalui program pelatihan bagi pemeriksa.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menandatangani nota kesepahaman dengan General Auditing Bureau of the Kingdom of Saudi Arabia. Kerja sama dengan BPK Arab Saudi itu antara lain bertujuan untuk peningkatan pelatihan pemeriksaan keuangan.

Ratifikasi tersebut dilakukan oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dan Presiden General Auditing Bureau (GAB) of the Kingdom of Saudi Arabia Hussam Alangari di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (5/12). Turut hadir dalam acara itu yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Anggota IV - Pimpinan Auditorat Keuangan IV Isma Yatun.

Tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan, memperkuat, mendorong dan mengembangkan kerangka kerja sama dan interaksi yang efisien antara kedua institusi. Khususnya di bidang pemeriksaan sektor publik dalam kerangka kerja INTOSAI, ASOSAI dan organisasi regional lain tempat keduanya tergabung sebagai anggota.

Kerja sama yang dijalin meliputi bidang peningkatan SDM melalui program pelatihan bagi pemeriksa. Kemudian penyelenggaraan seminar bilateral dan pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan haji, perbankan syariah, dan pengelolaan minyak dan gas.

Melalui penandatanganan MoU tersebut, dua lembaga pemeriksa dapat saling mendukung dan meningkatkan kerja sama secara proaktif. Khususnya dalam berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Kemudian untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di kedua negara.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menjelaskan, kerja sama ini terjalin karena BPK RI ingin menyerap ilmu dari General Auditing Bureau of the Kingdom of Saudi Arabia terkait pemeriksaan lembaga keuangan syariah. Ini terkait dengan semakin maraknya lembaga keuangan serta perbankan berbasis syariah di Indonesia.

Karenanya, BPK berusaha agar lebih siap dan berkompeten dalam melakukan pemeriksaan. "Kita ingin belajar dari kolega kami, bagaimana kira-kira melakukan pemeriksaan terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Seka-



■ Ketua BPK RI dan Presiden GAB Arab Saudi.

ligus bagaimana melakukan pemeriksaan yang lebih efektif untuk kegiatan dalam eksploitasi migas," kata dia.

Sementara, Hussam Alangari menjelaskan, kedatangannya ke Indonesia karena mendapat otorisasi untuk menandatangani MoU berkaitan dengan kerja sama di bidang pelatihan keuangan dengan BPK RI. Sebenarnya, lanjut dia, dua negara telah sering melakukan pelatihan bersama sebelum adanya nota kesepahaman itu.

Karenanya, momentum ini menjadi langkah untuk meresmikan rencana kerja sama antara dua lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut. "Hubungan ini sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Tapi secara formal dan resmi dilakukan pada hari ini melalui penandatanganan MoU antara dua lembaga ini," ujarnya.

Hussam menilai BPK RI telah memiliki kredibilitas di bidang pengawasan keuangan. Karenanya, BPK Arab Saudi menyetujui untuk menjalin kerja sama lebih lanjut untuk saling mendukung sehingga tercipta manfaat yang lebih konkret.

Dia menuturkan, melalui kerja sama yang berlaku selama lima tahun ini, kedua lembaga bersepakat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, dua lembaga juga akan melaksanakan pertukaran informasi terkait pemeriksaan keuangan.

"Melalui MoU ini semoga memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada dua lembaga dan kepada dua negara ini di masa yang akan datang. Itu salah satu tujuan utama penandatanganan MoU ini," katanya.

"BPK RI memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang keuangan. Oleh karena itu, nota kesepahaman ini diharapkan dapat memberi efek positif bagi kedua negara," tambah dia usai penandatanganan nota kesepahaman. ●

**BAHRULLAH AKBAR,**  
 ANGGOTA V - PIMPINAN AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V BPK

# Pendidikan Kunci Kesuksesan

**T**untutlah ilmu setinggi langit. Peribahasa ini tampaknya dicamkan betul oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar. Saat masih meniti karier di BPK, ia tak menyiakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu pengetahuannya. Kepada *Warta Pemeriksa*, Bahrullah berbagi kisah saat meniti karier sebagai penilik hingga akhirnya menjadi Anggota BPK. Berikut petikan wawancara dengan Bahrullah.



## Bagaimana kisah awal Bapak bergabung dengan BPK?

Saya masuk BPK 1985 dengan latar belakang sarjana muda. Ketika itu saya masuk pendidikan untuk menjadi penilik selama sembilan bulan. Bisa dikatakan, kami belajar dan kerja keras agar bisa lulus penilik (jabatan awal bagi sarjana muda). Pada waktu itu, ada empat jenjang Jabatan di BPK, verifikasi, penilik, pemeriksa muda dan pemeriksa.

Penempatan awal, di Auditorat E2 yang membawahi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Itu adalah awal karier saya sebagai pemeriksa. Setelah itu, pada 1990, saya mendapatkan beasiswa untuk studi ke Inggris di University of Hull, dengan golongan pangkat masih golongan II/c. Sekembali dari luar negeri pada 1992, ditempatkan di Auditorat J yang

membawahi Pemeriksaan BUMN. Sampai dengan tahun 1996, lalu mengajukan diri menjadi widyaiswara.

Jadi, dalam kurun waktu 1985-1996 saya menjadi auditor, terakhir sebagai pemeriksa muda. Kemudian, pada 1996 sampai 2003 saya menjadi widyaiswara. Nah, ketika menjadi widyaiswara itu, sambil mengajar di beberapa kampus, kepangkatan akademis mulai di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, sebagai asisten sejak 1993.

Selama kurun widyaiswara BPK, saya bersama widyaiswara senior BPK, mengadakan FGD seri seminar akuntansi dan *auditing*, kemudian, bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran, Bandung UPI YAI dan STIE Muchtar Thalib, membantu para karyawan untuk menyelesaikan pendidikan izin belajar dari D3 sampai S3, membuat

jurnal BPK, "the Audit Policy", aneunya, hanya sekali terbit, karena waktu itu responsnya masih sangat kurang, dan aktif menulis di *Warta Pemeriksa*, yang dulunya *Majalah Pemeriksa*.

Kemudian, pada 2003 saya lolos butuh di Kementerian Dalam Negeri, dan menjadi staf ahli di Kabupaten Lingga, Kepri pada 2007 hingga 2011. Pengukuhan Profesor di IPDN tahun 2015, dimana pangkat terakhir Lektor Kepala sejak 2001. Mengikuti pencalonan Anggota BPK 3 kali, Pertama pada 2004, kemudian 2009 dan 2011, Alhamdulillah pada 2011 terpilih menjadi anggota BPK, dan kembali terpilih untuk periode kedua pada 2016-2021.

## Bagaimana kondisi BPK ketika Bapak pertama kali bergabung? Bagaimana perbandingannya dengan saat ini?

Saya kira perubahan itu mulai terasa sejak adanya Proyek Modernization BPK, 1996-an, perubahan perangkat lunak, dan banyak karyawan BPK tugas belajar dalam dan luar negeri untuk mengambil S2 dan S3. Menurut saya ini adalah fase ke-3 pembangunan BPK setelah fase Bogor (1947-1973), dan fase ke-2, sejak menempati kantor baru di Jalan Gatot Subroto 31 (1973-2006). Saya kira momentum perubahan paling luar biasa adalah pada 2006 hingga sekarang 2019, ketika lahir Undang-Undang BPK No. 15 tahun 2006, terkait kemandirian Anggaran dan SDM, *peer review* dan pemeriksaan oleh Akuntan Publik, walaupun sepe-





Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar

”

Saya berharap fase ke-4 (2019) dengan ditandai renstra 2020-2024 menjadi lonjakan BPK semakin kredibel dan profesional.

nuhnya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Namun demikian, hal tersebut cukup menjadi pemicu organisasi sebagai organisasi pembelajaran, BPK *“lead by example”*. Saya berharap fase ke-4 (2019) dengan ditandai renstra 2020-2024 menjadi lonjakan BPK semakin kredibel dan profesional.

#### **Apa pengalaman paling berkesan ketika Bapak berkiprah di BPK?**

Pengalaman paling berharga yang saya dapatkan dari BPK, saya kira ketika saya mendapat beasiswa ke Hull University, UK. Terima kasih terutama saya sampaikan kepada Bapak Amrin Siregar (mantan anggota BPK), masih terngiang ucapan beliau, ingin melihat orang Betawi maju, ketika menyampaikan pesan keberangkatan. Selain itu, Ketika menjadi widyaiswara ikut mem-

bantu teman-teman mendapatkan izin belajar, dan mempola kerja sama pendidikan dengan Univeristas Negeri dan Swasta, bagi karyawan BPK. Menirikan Kompartemen Akuntan Sektor Publik (Desember 1999) bersama Prof. Mardiasmo dan Prof. Indra Bastian, atas arahan Prof. Zaki Baridwan dan Sekjen BPK, pada waktu Prof Bambang Triadji.

Belakangan, mendorong setiap inisiatif para auditor untuk aktif berkelompok dalam kegiatan olahraga, seperti; karate, panahan, sepeda, bola basket dan sepak bola.

#### **Pada 2017 hingga 2019, Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua (Waka) BPK. Dalam periode itu, apa saja pencapaian yang berhasil ditorehkan BPK?**

Kata kuncinya adalah usaha un-

tuk membangun perubahan budaya organisasi yang merupakan tupoksi waka yaitu, bertanggungjawab pada unsur penunjang dan pendukung pemeriksaan. Pertama yang saya susun adalah membuat *road map*. Selama dua setengah tahun saya menjabat, pola kebijakan yang saya lakukan adalah melanjutkan kebijakan terdahulu, dan melaksanakan setiap keputusan Badan, menjadi tataran operasional dan bermanfaat. Peran Waka hanya mengarahkan, menstimulasi dan mendorong para pelaksana agar konsisten terhadap perencanaan dan percepatan pelaksanaan yang sudah digariskan Badan.

Kepemimpinan periode 2017-2019 adalah membulatkan fase ketiga (2006-2019), antara lain; Pada Biro TI saya minta menyiapkan sistem satu pintu (*one gate policy/one integrated solution: Energi-Sinergi-Prestasi*) yaitu; satu.bpk.go.id. Hal itu mencakup seluruh aplikasi dan terintegrasi, seperti Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) versi 9, Manajemen kinerja dan risiko (Prisma), hasil Sidang BPK, dan tanya jawab (Dialog), Manajemen Layanan TI, Wasma, webinar dan Sistem Manajemen Aset. Inisiasi pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi elektronik kertas kerja pemeriksaan melalui penggunaan aplikasi SiAP dan penerapan satu auditor satu laptop.

Di level INTOSAI melalui *Working Group on IT Audit* untuk bidang data *analytics* dan *Big Data*, sebagai ketua Project penyusunan *Data Analytics Guideline* dan telah diserahkan dalam pertemuan Intosai ke-XXIII di Rusia, 2019. Pada saat ini BPK sebagai Ketua Tim Big Data Research Project on Auditing Technology Innovation dengan beberapa negara, antara lain; Inggris, Russia, Austria, Norwegia, Denmark, Brazil, Ekuador.

Pembenahan pada Biro SDM, dengan lingkungan *external environment* BPK melalui aktifnya di Lembaga Internasional, seperti INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI, membawa implikasi profesional kelembagaan dan personal, antara lain penggunaan *international standards supreme audit institution* (ISSAI), dan *best practices audit process*. Catatan khusus untuk ini bisa dilihat melalui program pengembangan *leadership* dan *communication skill*, yang sudah menghasilkan 5 (lima) *batch*, di mana mereka pelajari di Maastrich School of Management, Belanda, Macquarie University, Australia, dan di CIPD, United Kingdom. Tujuan dari program ini membangun kebersamaan antara staf berkemampuan bahasa, para pejabat eselon tiga, dua dan eselon satu, untuk berinteraksi dalam mengawal BPK ke depan, masing-masing angkatan berjumlah 20 orang.

Saat ini, pegawai yang sedang menempuh tugas belajar berjumlah 137 pegawai dan izin belajar berjumlah 185 pegawai. Jumlah pegawai dengan pendidikan D3 saat ini berjumlah 286 pegawai, S1 berjumlah 4.247 pegawai, S2 berjumlah 1.911 pegawai, dan 41 doktor, sedang mengikuti pendidikan Doktor 34 baik dalam dan luar negeri. Harapan saya menuju pencapaian Renstra 2020-2024 jumlah Doktor di BPK mencapai 100 dan 2.500 *master degree*. Selain itu, pengisian jabatan pelaksana BPK telah melalui seleksi terbuka dan manajemen talenta, serta diberlakukan *Merit System* sudah dimulai pada 2019. Kontekstual peningkatan SDM BPK dalam rangka membangun



Harapan saya menuju pencapaian Renstra 2020-2024 jumlah Doktor di BPK mencapai 100 dan 2.500 *master degree*.

Rumah Kita, Rumah para Pemeriksa Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK membina Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). Sampai dengan 2018, pengelolaan JFP diatur berdasarkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2010. Pada 2018, BPK mengajukan beberapa hal terkait perubahan pengelolaan JFP, sehingga terbit peraturan baru yaitu Permenpan Nomor 49 Tahun 2018. Melalui masa transisi 2 (dua) tahun diharapkan penerapan jabatan fungsional berlaku penuh di Oktober 2020 dan pemberlakuan sertifikasi berjalan sesuai dengan UU ASN. Selain itu, terdapat perluasan penerapan JFP pada unit kerja Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Biro

TI. Perluasan penerapan JFP dimaksudkan untuk memperluas karier pejabat fungsional pemeriksa (PFP).

Sementara dari sisi literasi, BPK telah meresmikan Perpustakaan Riset BPK yang berada di kantor pusat BPK pada Juni 2018. Perpustakaan Riset BPK dibangun untuk mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku, serta *e-books*, dan *e-journal*. Perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bahan untuk riset bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi (akuntansi dan Auditing) dan Fakultas Hukum, dan juga peminat riset tentang keuangan negara.

Dalam hal peningkatan kinerja organisasi, kita telah menerapkan penilaian mandiri (*self assesment*) menggunakan Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) atau Kerangka Pengukuran Kinerja Lembaga Pemeriksa. SAI PMF digunakan sebagai mekanisme yang komprehensif untuk menilai kinerja BPK. Pelaksanaan ini dimulai ketika saya mengunjungi kantor Pusat Intosai Development Initiative (IDI) di Oslo pada Juni 2018 dan membangun SDM BPK yang berkualitas untuk dapat

melakukan *self assessment* terhadap BPK RI, dan melakukan langkah penyusunan MOU yang ditandatangani pada acara INCOSAI XXIII di Moscow pada tanggal 26 September 2019. Kerja sama tersebut antara lain yang telah dilaksanakan pelatihan SAI PMF di Jakarta pada tanggal 30 Oktober yang diikuti oleh SAI Laos, SAI Vietnam, SAI Kamboja dan SAI Thailand, dari Indonesia pesertanya 22 orang, mereka diharapkan menjadi *peer reviewer* bagi Lembaga BPK lainnya, agar auditor BPK *Go Internasional*.

Ada tiga tujuan penerapan SAI PMF. Pertama, mendapatkan gambaran kinerja SAI dan tingkat kesesuaian dengan ISSAI yang ditetapkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) serta praktik terbaik lainnya. Tujuan kedua, menilai kekuatan dan kelemahan dalam rangka pengembangan kapasitas yang dibutuhkan. Adapun tujuan yang ketiga adalah membantu mengidentifikasi nilai dan manfaat SAI terhadap masyarakat. Sampai saat ini, hasil *peer review* BPK oleh New Zealand tahun 2004 agar BPK membangun *quality assurance system*. Sejalan dengan peningkatan untuk menjamin kesesuaian dan menjaga kualitas sesuai dengan INTOSAI GOV. dan/atau dengan IFPP, BPK menerbitkan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang dituang-

kan dalam Surat Keputusan BPK Nomor 03/K/I-XIII.2/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang menghasilkan rumah BPK dengan pondasi nilai dasar BPK yang terdiri dari profesionalisme, independen dan integritas. Atap Rumah BPK berupa visi dan misi ditopang dengan sembilan pilar, yang terdiri dari: (1) Independensi dan mandat; (2) Kepemimpinan dan tata kelola internal; (3) Manajemen sumber daya manusia; (4) Standar dan metodologi pemeriksaan; (5) Dukungan institusi; (6) Hubungan dengan pemangku kepentingan; (7) Pengembangan berkelanjutan; (8) Hasil dan (9) Kinerja audit. Sembilan pilar BPK yang telah ditetapkan sesuai dengan INTOSAI GOVT. dan ISSAI IFPP, namun demikian agar untuk menjaga kualitas hasil harus berkesesuaian dengan SAI *Performance Measurement Framework* (PMF) sebagai alat ukur kerja dan kinerja organisasi pemeriksa sedunia.

Banyak hal yang membuat saya menikmati sebagai Waka, antara lain berkomunikasi dengan para pensiunan BPK melalui Pepaska, dan menyiapkan hal-hal nonteknis bagi para karyawan BPK agar mereka betah di kantor melalui program nyaman sejak dari rumah. Program tersebut antara lain pembangunan Employee Care Centre (ECC), pembangunan Paud baik yang diinisiasi oleh sekjen mau-

pun oleh masing-masing perwakilan. Membuat perencanaan *green and eco building* dan menyiapkan perumahan karyawan BPK. Satu hal yang menurut saya masih perlu dikembangkan yaitu; Koperasi Karyawan BPK.

### **BPK baru melakukan perubahan di struktur pimpinan dan saat ini Bapak menjabat sebagai Anggota V BPK. Apa saja sektor yang menjadi perhatian Bapak?**

Ketika masih menjabat Waka BPK, wilayah bebas korupsi (WBK) itu saya genjot, dan terus meningkat dan harapan saya itu bisa terus berjalan, dan diberikan insentif. Sebagai Anggota V, WBK juga akan saya teruskan, untuk wilayah Barat ini saya ingin seluruhnya agar selalu terjaga integritas, profesionalitas, dan independensi para pemeriksa.

Saya ingin membuat *piloting audit* kinerja. Saya sudah rapat dan akan ada lima daerah yang diaudit dalam semester pertama 2020, dan membuat platform perubahan, meningkatkan nilai tambah hasil pemeriksaan BPK. Latar belakangnya, setelah 83 persen laporan keuangan pemerintah daerah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya apa nilai tambah BPK terhadap audit keuangan? Menyusun ulang SOP penyampaian Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau kinerja tahun berjalan kepada Lembaga perwakilan, antara lain dibuat semacam ringkasan khusus, untuk disampaikan. Sehingga, pemerintah daerah tahu dan hasil audit kinerja dan PDTT dan sebagai bahan untuk pengambil kebijakan, *action plan* dan tindak lanjut. Selain itu, diperlukan *governance* dan *risk management policy* di mana pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah dibuatkan *fix agenda* dalam sidang badan secara lebih rinci dan transparan.

Yang menjadi atensi saya ke depan, antara lain kebijakan *contracting out* dalam penugasan pemeriksaan bagi Kantor Akuntan Publik terhadap entitas pemerintahan daerah di AKN 5. ●



ELVYANA, KETUA KOMITE IV DPD RI

# DPD Siap Bekerja Sama Lebih Erat dengan BPK



■ Ketua Komite IV DPD RI, Elvyana

**D**ewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ingin meningkatkan hubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di daerah. Ketua Komite IV DPD RI Elvyana meyakini, sinergi dua lembaga tersebut bisa diwujudkan ke depan. Kepada *Warta Pemeriksa*, Elvyana menyampaikan beberapa rencana kerja sama dan harapan koordinasi dengan BPK ke depan. Berikut petikan wawancaranya:

**Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap. Mohon dijelaskan apa saja tugas Komite IV DPD saat ini?**

Komite IV DPD RI memiliki lingkup tugas yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta lembaga keuangan dan perbankan. Selain itu, Komite IV juga memiliki lingkup tugas berkaitan dengan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, statistik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investasi serta penanaman modal.

Terkait dengan BPK, hubungan Komite IV DPD yakni bertugas memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. DPD juga menerima dan membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD.

### **Apa rencana sinergi Komite IV DPD dengan BPK ke depan?**

Jadi kami semua baru dilantik September 2019. *Alhamdulillah*, saat ini kami diterima dengan sangat baik oleh pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami ingin target-target kinerja dari Komite IV itu dapat segera terlaksana di lapangan. Fokus kami yakni tidak ingin lagi produk dari Komite IV itu hanya administrasi belaka. Kalau berupa administrasi maka cukup pandangan kami terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) saja.

Kami ingin, sebagai orang daerah, menolong daerah kami dari pusat. Berbagai kasus, misalnya, seorang bupati mendapatkan rentang waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ternyata, dalam rentang 60 hari itu, pihak aparat penegak hukum apapun tidak boleh masuk. Tetapi, realita di lapangan mereka (pemimpin daerah) sempat direcoki bahkan menjadi "ATM" juga.

### **Apa yang perlu disinergikan antara DPD dengan BPK?**

Kami memandang, ke depan perlu ada sinergi antara BPK sebagai auditor negara dengan Komite IV DPD RI yang memang sudah ditugaskan sebagai pengawas. Menurut kami, perlu dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama sehingga ke depan tidak ada lagi kepala daerah yang salah menggunakan anggaran, tidak lagi bekerja dalam tekanan, dan hasil pengawasannya bisa membaik. Misalnya, untuk opini dari mungkin sebelumnya *disclaimer* atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) bisa menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Di samping itu, tujuan kami adalah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Saya kira anggaran itu harus menasar pada indikator-indikator yang jelas seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Hal itu tentu saja menuntut adanya sinergi antara wakil rakyat dan wakil daerah yang ada di Komite IV DPD dengan BPK RI. *Alhamdulillah*, BPK luar biasa menyambut kami dan kami sepakat untuk melakukan kerja sama ke depan. Sehingga, peran DPD akan

meningkat untuk menolong daerah yang kami wakili.

### **Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Komite IV DPD RI untuk terus membantu mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?**

Kami sudah melakukan konsultasi ke Jawa Timur dan Jawa Barat untuk menampung masukan. Hal ini terutama karena kami *concern* terhadap temuan-temuan yang menyangkut kepala daerah. Kami ke sini memang mewakili daerah. Dari Jatim kemarin, ada tiga kabupaten yang kami kunjungi yakni Pasuruan, Jember, dan Tulungagung. Itu kami sudah ke sana.

Secara administrasi kerja sama dengan BPK kami akan lengkapi. Secara tindakan, kami akan anggarkan dalam anggaran 2020 semacam pendidikan dan pelatihan (diklat) atau pembekalan materi seperti yang sudah disampaikan Pak Harry Azhar Azis (Anggota VI BPK) dan Pak Bahrullah Akbar (Anggota V BPK). Saya yakin, tidak semua kepala daerah pernah mendapatkan materi ini.

Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak tahu bahwa mereka punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan. Saya pun yakin tidak ada kepala daerah yang berniat melakukan penyelewengan tersebut. Apalagi sekarang semua orang yang bertarung lewat Pilkada langsung itu punya keinginan untuk menyejahterakan rakyat.

Jadi, intinya, ke depan kerja sama dengan BPK itu akan kita pertegas dengan melakukan MoU. Kita bentuk pengawasan bersama. DPD juga siap membantu BPK mensosialisasikan keberadaan BPK dalam berbagai kegiatan. Contohnya, dalam kegiatan *goes to campus*.

### **Apa harapan Ibu untuk koordinasi dengan BPK ke depan?**

*Alhamdulillah*, saya ikut memilih lima pimpinan BPK baru ketika masih bertugas di Komisi XI pada periode lalu. Dengan komposisi pimpinan seperti sekarang ini, saya optimistis sekali, semua dalam posisi siap bekerja.

Dan sebetulnya, kami tidak menyangka, BPK membuka ruang yang luar biasa dan tawaran kerja sama itu malah datang dari anggota BPK. Jadi, keinginan kami terpuaskan hari ini. ●



Kami memandang, ke depan perlu ada sinergi antara BPK sebagai auditor negara dengan Komite IV DPD RI yang memang sudah ditugaskan sebagai pengawas.

# Pasolart

## Dukungan Pegawai BPK Bagi Tenun Sumba Timur

Tenun ikat Sumba Timur memiliki kualitas dan nilai seni tinggi, namun para pengrajin kesulitan memasarkan produknya.

**B**erawal dari penugasan melakukan pemeriksaan tiga tahun lalu, Rifki Gunawan jatuh cinta kepada tenun ikat khas Sumba Timur. Pemeriksa Muda di BPK Perwakilan Prov NTT itu pun akhirnya membangun galeri di rumahnya di Cempaka Putih dengan nama Pasolart: House of East Sumba Woven.

Rifki menceritakan, ia memulai usaha Pasolart sekitar tahun 2017. Usaha ini dilatarbelakangi kepedulian terhadap kain tenun ikat karya masyarakat di Kabupaten Sumba Timur yang berkualitas dan bernilai seni tinggi. Kain ini, menurut dia, harus dipertahankan kelangsungan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin tenun di Kabupaten Sumba Timur.

"Jadi bisnis ini dilandasi dengan



■ Menteri Perdagangan saat mengunjungi booth Pasolart di Mall Kota Kasablanka.



■ Galeri tenun Sumba Timur Pasolart di Pameran JCC.

unsur nasionalisme yaitu kepedulian terhadap budaya dan produk unggulan anak bangsa dari Kabupaten Sumba Timur dan unsur sosial yaitu untuk membantu memasarkan hasil produk pengrajin tenun ikat serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sumba Timur," ucap dia.

Atas alasan itulah ia mendirikan Pasolart untuk memasarkan hasil kerajinan tenun ikat masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Dia pun memproduksi tenun ikat itu menjadi bentuk lain, seperti pakaian jadi dan tas.

Rifki menambahkan, bisnis ini ia jalankan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dirinya selaku pegawai negeri sipil untuk memberikan dam-

pak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, khususnya para pengrajin. Tekadnya itu tergugah ketika mendapatkan penugasan melakukan pemeriksaan di Kabupaten Sumba Timur pada 2016. Saat itu ia melihat potensi unggulan produk daerah di Kabupaten Sumba Timur yang memiliki kualitas dan nilai seni tinggi, namun para pengrajin kesulitan memasarkan produknya ke masyarakat. "Sehingga saya terdorong untuk membantu memasarkan dan menjualkan tenun ikat dari pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sumba Timur."

Ia awalnya mencoba membantu dengan menjual ke teman-teman kerja di BPK secara personal. Ternyata, minat para pegawai BPK atas keunikan tenun



■ Pembeli tenun Pasolart dari Australia.



■ Rifki Gunawan bersama rekan/pejabat di BPK saat pameran di JCC.

## Media sosial Pasolart



@pasolart  
dan  
@house\_of\_pasolart



Pasolart

ikat dari Kabupaten Sumba Timur sangat tinggi.

"Pada saat itu saya bisa membantu menjualkan tenun ikat dari pengrajin di Kabupaten Sumba Timur senilai Rp25 juta dalam 1 pekan. Kemudian saya mendapat dukungan dari para pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sumba Timur untuk membantu memasarkan dan menjualkan produknya di Jakarta. Akhirnya, saya mencoba membuat galeri di Jakarta dan memulai memasarkan dan menjual ke masyarakat luas khususnya pecinta tenun dalam negeri," ujar dia.

Ia melakukan pemasaran secara *online* maupun *offline*. Pemasaran *online* dilakukan dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Melalui media sosial tersebut, Pasolart menyediakan katalog produk sehingga konsumen bisa memilih motif yang mereka inginkan.

Pemasaran secara tradisional ia lakukan melalui beragam cara. Selain melalui galeri yang didirikannya, ia mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan secara nasional, seperti di Jakarta Convention Center dan mal-mal di Jakarta.

### Modal Rp30 Juta

Soal modal, ia punya cerita unik tersendiri. Awalnya ia hanya memiliki modal Rp30 juta untuk membeli tenun ikat secara langsung dari pengrajin. Mengingat modal yang terbatas namun harga tenun ikat yang relatif cukup tinggi, ia pun hanya dapat beberapa lembar kain tenun saja untuk dijual.

Harga selembar kain tenun ikat yang menggunakan pewarna sintesis/kimia sekitar Rp800 ribu sampai dengan Rp1,2 juta. Sedangkan yang menggunakan pewarna campuran atau alami sekitar Rp2 juta sampai dengan Rp4 juta. "Saat ini, modal yang saya miliki untuk menjalankan bisnis ini telah mencapai Rp150 juta," ucap dia.

Dengan dukungan dari para pengrajin, harga jual tenun ikat di galeri di Jakarta bisa bersaing dengan harga

jual tenun ikat di galeri di Kota Kupang. Bahkan, saat ini Pasolart sudah bekerja sama dengan beberapa pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sumba Timur yang dapat menggunakan sistem konsinyasi. "Pengrajin menitipkan kain tenun ikatnya di galeri saya saat saya sedang mengikuti pameran di Jakarta dan hasil penjualan akan dilakukan bagi hasil sehingga tidak perlu modal untuk melakukan pembelian terlebih dahulu.

Namanya berwirausaha tentu pernah mengalami penurunan penjualan. Tingkat penjualannya pernah turun saat maraknya penjualan tenun ikat di Jakarta oleh para pedagang karena tenun ikat dari Sumba Timur telah digunakan beberapa artis nasional dan digunakan oleh desainer untuk kegiatan *fashion show*, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, karena adanya kenaikan harga pengiriman barang dari Kabupaten Sumba Timur ke Jakarta. Hal itu menjadikan harga jual tenun ikat Sumba Timur menjadi lebih tinggi.

Namun, ia mencoba bertahan dan melanjutkan usahanya dengan semangat nasionalisme dan sosial. Berkat konsistensinya dan kerja kerasnya, bisnis yang ia jalani tetap berjalan. Bahkan, produk Pasolart telah dipakai pejabat negara.

"Kami telah menjadi mitra binaan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut menjadikan bisnis yang saya jalani mengalami perkembangan usaha bahkan memiliki peluang untuk mengikuti kegiatan pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional," tutur dia.

Rifki berencana membuka cabang Pasolart di Kota Yogyakarta untuk memperluas cakupan pasar dan mendekatkan diri ke pelanggan. Selain itu, ia juga bakal menggencarkan partisipasi pada kegiatan pameran di luar negeri yang diselenggarakan pemerintah. "Ini sebagai upaya memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke mancanegara," katanya. ●

# Berkreasi Lewat Korps Musik BPK

Meski awalnya tidak memiliki kemampuan memainkan alat musik, para anggota Korps Musik BPK berhasil tampil di perayaan HUT ke-72 BPK.



■ Korps musik BPK

Rapat persiapan hari ulang tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-72 yang digelar pada Oktober tahun lalu merupakan momen penting lahirnya Korps Musik BPK. Dalam rapat itu, Kepala Biro Umum BPK Sudarminto Eko Putra menyarankan untuk membuat terobosan baru dalam perayaan HUT BPK.

"Jadi, waktu itu kami rapat dengan Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif) dan kami usulkan untuk membentuk korps musik supaya lebih meriah dan berbeda dengan sebelumnya," kata Eko kepada *Warta Pemeriksa*.

Eko mengatakan, saat ini anggota Korps Musik adalah staf pengamanan di BPK. Korps itu berlatih

mulai dari pukul 19.00 hingga 21.00 WIB sepekan sekali. Namun, untuk momen tertentu seperti persiapan penampilan di ajang Porseni BPK, jumlah latihan ditingkatkan menjadi sepekan dua kali.

Eko mendatangkan pelatih khusus dari Mabes TNI Angkatan Laut (AL) untuk membina Korps Musik BPK. Dengan pelatih profesional, Eko mengaku, anggota korps yang sebelumnya tidak punya kemampuan bermusik pun menjadi bisa tampil. Bahkan, kata Eko, Korps Musik BPK sempat tampil di acara-acara BPK yang cukup besar seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI.

"Hasilnya ternyata baik sekali. Kita bisa tampil pada perayaan 17 Agustus itu tidak kecil lho," kata Eko.





■ Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK periode 2017-2019), Bahrullah Akbar (Anggota V BPK), Sekretaris Jenderal BPK, dan Kepala Biro Umum BPK berfoto bersama korps musik BPK.

Eko mengatakan, staf pengamanan sebelumnya hanya memiliki modal keahlian baris-berbaris. Biro Umum bahkan butuh waktu dua bulan untuk melengkapi kebutuhan Korps Musik BPK sesuai permintaan pelatih sebelum perayaan HUT BPK ke-72. Ajang itu menjadi momen penampilan perdana Korps Musik BPK.

Eko mengatakan, seleksi masuk Korps Musik BPK ditentukan berdasarkan postur tinggi badan dan kebugaran. Dia mengatakan, terdapat sekitar 270 staf pengamanan BPK. Dia memutuskan memilih 25 orang untuk menjadi personel Korps Musik BPK.

"Kita cari yang kebugarannya baik karena memang latihannya cukup mengurus fisik. Postur tinggi juga kita tentukan dari yang tinggi terus lebih pendek lagi untuk bangun formasi," kata Eko.

Eko mengatakan, seluruh anggota Korps Musik BPK juga telah mengatur waktu *shift* kerja. Sehingga, latihan tidak mengganggu kerja pengamanan di BPK.

Awalnya, kata Eko, latihan Korps Musik BPK bisa mencapai tiga jam dalam sehari. Ketika itu, seluruh personel baru mencoba mengenali alat musiknya masing-masing.

Dia mengatakan, proses latihan awalnya terpisah antara bagian drum band, terompet, dan alat musik lain. "Mereka dalam waktu sebulan latihan sendiri-sendiri. Setelah itu baru mereka dikonsolidasikan," kata Eko.

Eko mengatakan, meski tidak memiliki kemampuan memainkan alat musik, anggota Korps Musik BPK mau belajar giat. Dengan latihan-

an telaten dan disiplin tinggi, Korps Musik pun berhasil tampil di perayaan HUT ke-72 BPK.

"Jadi, kalau ada yang berminat bergabung, asalkan mau berlatih kuat dan semangat pasti bisa," kata Eko.

Setelah itu, Korps Musik BPK juga pernah tampil dalam kegiatan *gathering* BPK pada Januari 2019. Dalam waktu dekat, Eko mengatakan, Korps Musik juga sedang bersiap untuk tampil kembali pada perayaan HUT BPK ke-73.

"Kami juga sudah merencanakan untuk tampil di sejumlah acara eksternal," kata Eko.

Eko mengatakan, salah satu manfaat yang dirasakan oleh personel Korps Musik BPK adalah rasa bangga. Dia menjelaskan, dengan tampil di ajang bergengsi di lingkup BPK, Korps Musik mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk unsur pimpinan. "Mereka bisa berfoto bersama dengan anggota BPK juga itu sebuah kebanggaan luar bisa untuk mereka," kata Eko.

Selain itu, menurut Eko, kegiatan Korps Musik BPK juga memberikan manfaat kebugaran untuk para personelnnya. Dia mengatakan, latihan fisik rutin itu bisa menjadi bagian dari olahraga.

Eko mengatakan, saat ini memang Korps Musik BPK hanya terdiri atas staf pengamanan. Namun, dia mengaku membuka kesempatan kepada seluruh pegawai BPK yang ingin terlibat. Dia mengatakan, kesibukan pemeriksaan dan rapat yang membuat penat bisa diobati dengan latihan bersama Korps Musik.

"Siapa yang tertarik dan suka, *monggo*," kata Eko. ●

# BPK Pertegas Komitmen Jaga Kode Etik



■ Anggota MKKE BPK.

Penerapan kode etik harus dipahami bersama dan melekat dalam pikiran.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk terus menjaga kode etik. Hal itu disampaikan dalam *Workshop* Implementasi Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang digelar pada Senin (28/10). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam rangka menjaga nilai-nilai dasar BPK.

"Implementasi nilai-nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat secara signifikan membantu mendorong tercapainya pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat," ujar Anggota V - Pimpinan AKN V BPK Bahrullah Akbar dalam arahannya pada kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Bahrullah menyampaikan, kewajiban dan larangan pemeriksaan BPK dalam penerapan kode etik maupun mekanisme penegakannya harus betul-betul dipahami bersama dan melekat dalam pikiran. Kode etik juga harus dijadikan pegangan dan batasan bagi setiap pemeriksa BPK maupun pemeriksa BPK.

"Ini yang harus kita lakukan bersama-sama agar BPK dan entitas tidak bertepuk sebelah tangan di dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik BPK," ungkapnya.

*Workshop* dengan tema "Implementasi Kode Etik BPK" ini diikuti oleh 255 orang yang meliputi pejabat struktural dan fungsional BPK, pejabat dan pegawai pada Pemerintah Pro-

vinsi DKI Jakarta, kementerian/lembaga, dan BUMN. Kegiatan ini menghadirkan seluruh Anggota Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) BPK sebagai narasumber.

Adapun Anggota MKKE BPK tersebut yaitu Wakil Ketua BPK (Ketua merangkap Anggota MKKE) Agus Joko Pramono, Anggota IV - Pimpinan AKN IV BPK (Anggota MKKE) Isma Yantun, dan Anggota MKKE dari eksternal BPK yaitu Jusuf Halim, Rusmin, dan Indriyanto Seno Adji.

Pada lokakarya tersebut, narasumber menyampaikan hal-hal mengenai mekanisme penanganan yang dilakukan oleh MKKE. Hal ini menyusul telah ditetapkannya peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan juga Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik.

Dengan dilaksanakannya lokakarya ini, diharapkan peserta dapat mengenal kode etik BPK dan MKKE BPK serta berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Selain itu, juga bersama-sama menjaga lembaga masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang menciptakan kesempatan terjadinya pelanggaran.

Inspektur Utama BPK Ida Sundari berharap, kegiatan lokakarya tersebut bisa menjadi ajang diskusi untuk meningkatkan penegakan kode etik BPK. Hal itu terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di masing-masing instansi.

"Peran pimpinan BPK dan para pemeriksanya dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan dukungan semua pihak agar dalam mengawal harta negara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ida. ●



■ *Workshop* Implementasi Kode Etik BPK dihadiri oleh Anggota V - Pimpinan AKN V BPK Bahrullah Akbar di Auditorium BPK Lt. 2, 28 Oktober 2019.

# BPK Dorong Pemda Tingkatkan Tindak Lanjut Rekomendasi

BPK ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah (pemda) berkolaborasi dalam rangka perbaikan yang terus-menerus dalam tata kelola keuangan, khususnya dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Penyelesaian tindak lanjut mesti dilakukan karena merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V Bahrullah Akbar saat menyampaikan arahan pada acara "Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2019 dan Sosialisasi SIPTL" di Auditorium Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Selasa (12/11).

Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, para inspektur, serta admin dan inputer aplikasi SIPTL se-Provinsi Bengkulu. Selain itu turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Novian Herodwijanto dan para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Bahrullah mengatakan, BPK ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah (pemda) berkolaborasi dalam rangka perbaikan yang terus-menerus dalam tata kelola keuangan, khususnya dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Pada kesempatan tersebut, Bahrullah menekankan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan penggunaan SIPTL dan meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut.

"Saya berharap Provinsi Bengkulu bisa menyelesaikan tindak lanjut hingga 85 persen," kata Bahrullah.



■ Anggota V BPK, Bahrullah Akbar.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Aryo Seto Bomantari dalam laporannya mengatakan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu masih relatif rendah.

"Target tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang diharap-

kan adalah sekurang-kurangnya 75 persen," ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, perlu ada program percepatan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat tercapai, sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah semakin meningkat, transparan, dan akuntabel.

Guna lebih mendorong pemda se-Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti rekomendasi, usai pembukaan sosialisasi SIPTL, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Eksekutif Percepatan Tindak Lanjut.

FGD ini diikuti oleh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu dan dipimpin oleh Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V Bahrullah Akbar. FGD tersebut bertujuan memperoleh pemahaman bersama tentang strategi dan juga dukungan serta komitmen dari kepala daerah dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut. ●

# BAP DPD Konsultasikan Keuangan Daerah



■ Suasana rapat konsultasi DPD RI dengan BPK RI.



■ Foto bersama Pimpinan BPK RI dengan DPD RI.

Dalam pertemuan dengan BPK, BAP DPD RI mempertanyakan soal opini WTP dan WDP yang diterima pemda.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada pertengahan November. Kunjungan ini dalam rangka rapat konsultasi tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019. Pertemuan ini dipimpin Ketua BAP DPD RI Sylviana Murni dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Sylviana mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan di tiga provinsi, yaitu Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, ditemukan beberapa hal seperti penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga perlu ada yang diklarifikasi

langsung dengan BPK.

"Pemda yang mengalami penurunan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Provinsi Jawa Barat," kata Sylviana.

Dalam pertemuan tersebut, Sylviana mempertanyakan soal opini WTP dan WDP yang diterima pemda. Ia menyebut, berdasarkan penilaian BAP DPD, sering kali pemda yang mendapatkan opini WTP mengalami defisit keuangan lebih besar dibandingkan dengan pemda yang mendapatkan opini WDP. "Kerugian negara cenderung meningkat dalam tiga tahun meski meraih opini WTP lima tahun berturut-turut," tutur Sylviana.

Sylviana juga menanyakan soal kedaluwarsa tuntutan ganti kerugian negara. Ia menyebut hal ini penting dikemukakan untuk mengantisipasi semakin bertambahnya kerugian negara. "Apakah pemantauan BPK ada kedaluwarsanya, misalnya 8 tahun atau 15 tahun ada masanya, atau bagaimana bila yang bersangkutan meninggal dunia," ujar dia.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa BPK ikut mengingatkan entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. "Bahkan BPK juga menggelar rapat dua kali dalam setahun dengan inspektorat terkait hal itu," ucap dia.

Ia mengingatkan, opini suatu entitas tidak bisa menjadi jaminan pada tahun berikutnya. Biasanya, kata dia, ketika ada penyelenggaraan pilkada, maka ada risiko terhadap belanja barang dan belanja modal. Dalam prosesnya, BPK juga sudah melakukan pemeriksaan secara lebih hati-hati dan sesuai standar. Bahkan akan ada proses pemeriksaan yang jauh lebih teliti dan akurat untuk 2019 hingga 2024.

Ketua BPK juga menjelaskan, daerah yang meraih opini WTP tak berarti bebas dari korupsi. "Hal ini tidak dapat dideteksi dalam pemeriksaan, meskipun prosedur pemeriksaan dirancang dengan berdasarkan pertimbangan risiko terjadinya kesalahan penyajian material yang disebabkan kesalahan atau kecurangan." ●

# Ganda Putra Tenis BPK Raih Emas di Pornas Korpri ke-XV



Bibit-bibit muda tim tenis BPK diharapkan bermunculan sehingga ada regenerasi.

**P**erwakilan kontingen Badan Pemeriksa Keuangan meraih prestasi gemilang di cabang tenis Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri ke-XV. Pasangan Kasman Alwi dan Yusfridar, perwakilan dari BPK, meraih medali emas ganda putra jumlah usia 80.

Yusfridar yang menjabat Kepala Sub Bag Umum BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara mengaku prestasi yang ia raih cukup spesial. Hal ini karena ia raih bersama dengan teman karibnya yaitu Kasman Alwi.

“Meski hanya bertemu beberapa hari sebelum keberangkatan ke Bangka Belitung, namun saya dengan Pak Kasman telah lama berpasangan di ganda putra,” tutur dia kepada Warta Pemeriksa belum lama ini. Ia mengatakan raihan tahun ini tak lepas dari target yang sejak awal ia canangkan. Ia mengatakan sejak awal kontingen BPK menargetkan meraih empat emas dari cabang tenis.

Empat emas itu antara lain berasal dari beregu putra, ganda putri, ganda putera jumlah usia 100 tahun, dan ganda putera jumlah usia 80 tahun. Sayangnya, salah satu peserta di ganda putri tak ikut karena cedera, sementara ganda putera usia 100 tahun yang di 2017 meraih emas, mesti menyerah di fase 16 besar.

“Sementara beregu kami gugur di 8 besar. Kami terpaksa kalah oleh kontingen dari Kemenag (Kementerian Agama) yang memiliki dua pemain nasional,” ucap dia.

Terkait prestasi yang ia raih, ia mengaku hal ini tak lepas dari latihan yang telah dilakukan dan aturan Pornas Korpri tahun ini. Ia mengaku telah berlatih keras selama satu bulan

sebelum Pornas Korpri digelar. Walau hanya latihan Sabtu dan Minggu, tapi ia lakukan secara rutin.

Sementara soal aturan, mulai tahun ini pemain nasional dilarang tampil di perorangan dan ganda. Pemain nasional hanya boleh turun di beregu, baik beregu putra maupun putri. “Jadi tahun ini peluang bagi kami terbuka lebar. Saya sendiri meraih emas ketika di perorangan 2017,” ungkap dia.

Sementara itu, Kasman Alwi mengatakan telah berlatih selama dua pekan bersama tim lain dari Sulawesi Tengah. Meski tak tiap hari, namun ia menyempatkan bermain minimal beberapa jam ketika memiliki waktu senggang.

Kemudian sehari sebelum keberangkatan menuju Bangka Belitung, berlatih dengan 10 atlet lainnya dari kontingen BPK. “Alhamdulillah BPK mengirimkan pemain ke lima cabang olahraga, namun yang memberikan medali hanya dari Tenis,” ucap pria yang menjadi pegawai BPK semenjak 1997.

Terkait prestasi, ia mengaku setiap kali mengikuti pertandingan selalu menargetkan untuk meraih juara. Sehingga ia terus memberikan yang terbaik bagi tim BPK.

Ke depan, Kasman berharap ada regenerasi di tim tenis BPK. Selama ini, menurut dia, peserta BPK yang ikut di tim tenis selalu sama. Padahal semakin lama, ia dan Yusfridar semakin berumur, sementara dari kontingen lembaga dan Kementerian atau provinsi lain telah melakukan regenerasi.

“Kami ingin ada bibit-bibit muda di tim BPK, namun mau tak mau harus ada sarana dan prasarana untuk memupuk itu. Minimal ada lapangan tenis di tiap perwakilan BPK,”

tutur pria yang kini memasuki usia 44 tahun.

Hal yang sama ternyata juga dikatakan Yusfridar. Ia mengatakan perlu ada regenerasi di tim tenis. Ia mengatakan, di tim tenis, paling muda adalah Kasman yang memasuki usia 44 tahun. Sementara ia sendiri kini berusia 46 tahun. “Tenis itu olahraga yang menyenangkan. Bila ada lapangan, maka tentu ada pelatihan tenis juga,” ungkap dia.

Sebanyak 3.985 peserta dari 34 Provinsi dan 46 kementerian/lembaga yang sudah terdaftar untuk mengikuti ajang ini. Terdapat sembilan cabang olahraga yang dipertandingkan dalam ajang Pornas XV Korpri, di antaranya futsal, tenis meja, tenis lapangan, voli, lari 10 kilometer, catur, bulutangkis, senam, dan gateball. Ajang dua tahunan ini digelar pada 10 hingga 18 November 2019. ●





# Kerja Bareng untuk Kualitas Anggaran BPK



OLEH MAULANA GINTING  
Inspektur PIMK

Salah satu pokok-pokok kebijakan belanja K/L 2020 adalah melakukan penghematan, utamanya belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*, termasuk pembatasan rapat dalam kantor di luar jam kerja dan konsinyasi.

**R**encana Kerja Tahunan (RKT) BPK adalah merupakan pedoman operasional dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK. RKT merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategis BPK.

Dalam upaya menciptakan kualitas anggaran BPK, perencanaan anggaran harus memegang prinsip kewajaran, selektif dan efisien. Selanjutnya dalam pokok-pokok kebijakan anggaran tahun 2020 antara lain menyebutkan mendukung birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi serta meningkatkan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Sejak tanggal 2 s.d. 11 September 2019 Biro Keuangan, Direktorat PSMK, Inspektorat PIMK, dan 66 satker melaksanakan rapat kerja penelitian dan reuiu RKA 2020 di

Hotel Century Senayan Jakarta. Kegiatan tersebut diberi nama Penelitian dan Reviu 4 Pihak. Harapan atas kegiatan tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas RKA BPK.

Pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019 telah dilakukan penelitian dan reviu 3 pihak antara Biro Keuangan, Direktorat PSMK, dan Inspektorat PIMK. Hasil penelitian dan reviu 3 pihak telah dirumuskan dalam Berita Acara Penelitian dan Reviu Bersama serta disampaikan kepada seluruh satker BPK untuk dilakukan perbaikan melalui Nota Dinas Sekjen BPK tanggal 6 Agustus 2019.

Pedoman Reviu RKA 2020 adalah PMK Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Penyusunan anggaran K/L berpedoman pada tiga pilar sistem penganggaran, yaitu:

#### 1. Pendekatan Penganggaran Terpadu

Keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana, selain itu diharapkan dapat mewujudkan satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya.

#### 2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### 3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran.

Pada penelitian dan reviu 4 pihak peserta Raker Keuangan berjumlah 66 satker, dibagi dalam 3 gelombang pertemuan masing-masing 25 satker pada gelombang 1, 21 satker pada gelombang 2, dan 20 satker pada gelombang 3.

### Hasil Penelitian Direktorat PSMK Pada Pertemuan 3 Pihak

Dari RKA satker antara lain diketahui bahwa porsi pemeriksaan kinerja masih dibawah 21 persen sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKT 2020, bahkan masih terdapat 3 satker

dengan target LHP Kinerja masih dibawah 10 persen. Selain itu dari hasil penelitian belanja non pemeriksaan diketahui masih terdapat antara lain, perjalanan dinas biasa melebihi standar, masih terdapat honor tim pelaksana kegiatan, frekuensi dan jumlah orang pada akun belanja relatif tinggi dan tingginya frekuensi perjalanan dinas dalam kota tanpa penje-lasan lokasi tujuan.

### Hasil Reviu Inspektorat PIMK Pada Pertemuan 3 Pihak

Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran pengeluaran. Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun sebagai dokumen pendukung KAK. RAB menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian ke-luaran. Hasil reviu menunjukkan masih terdapat penjelasan dalam KAK tidak sejalan dengan RAB.

RKT disusun pada T-2 dan digunakan satker sebagai pe-doman dalam penyusunan Prognosis dan RKA. Satker dalam menyusun rencana kegiatan diwajibkan berpedoman ke-pada RKT. Dari hasil reviu diketahui satker masih mengusulkan belanja di luar biaya yang diperkenankan dalam RKT 2020. Selain itu masih terdapat anggaran perjananan dinas me-lebihi batas maksimal dan di luar biaya yang diperkenankan dalam RKT 2020.

Salah satu pokok-pokok kebijakan belanja K/L 2020 ada-lah melakukan penghematan, utamanya belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*, termasuk pembatasan rapat dalam kantor di luar jam kerja dan konsinyasi. Kebi-jakan ini menjadi acuan bagi kita dalam menyusun RKA BPK. Atas hasil reviu tersebut, Inspektorat PIMK mengusulkan para satker menyesuaikan perhitungan anggaran serta merelokasi anggaran tersedia untuk kegiatan lain dan melaksanakan *in house training* penyusunan RAB dan KAK untuk para petugas keuangan dan pejabat struktural.

Hasil penelitian dan reviu 3 pihak telah disampaikan kepada seluruh satker melalui Nota Dinas Sekjen BPK pada tanggal 6 Agustus 2019. Selanjutnya pada penelitian dan reviu 4 pihak pada tanggal 2 s.d. 11 September 2019 diharap-kan seluruh hasil penelitian dan reviu sudah ditindaklanjuti, diverifikasi dan dinyatakan sudah benar sesuai dengan RKT 2020 dan memenuhi PMK Nomor 142/PMK.02/2018.

Biro Keuangan menyampaikan harapan bahwa semua satker telah menindaklanjuti temuan penelitian dan reviu sebelum mengikuti pertemuan 4 pihak, sehingga pada Raker Keuangan 2 s.d. 11 September 2019 fokus kegiatan hanya untuk memastikan bahwa TL atas penelitian dan reviu 3 pi-hak telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Salah satu yang kami alamatkan pada hasil kerja bareng ini, adalah terciptanya sensitifitas para pelaksana tugas ke-uangan dan para kepala satker dalam melaksanakan tugas menyusun RKA mematuhi ketentuan, mempedomani RKT sehingga tercipta kualitas anggaran BPK yang handal, trans-paran, dan akuntabel. ●

# Penghargaan 2019



BPK mendapat penghargaan sebagai lembaga yang telah berhasil menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



Majalah Warta Pemeriksa, Bronze Winner kategori The Best Government InMA 2019.



BPK meraih penghargaan JDIH Terbaik sejak 2015-2018.



BPK meraih Penghargaan Taxpayer Awards 2019.



Majalah Warta Pemeriksa, Bronze Winner PR Indonesia Award kategori Media Cetak Sub Kategori Lembaga.

BPK sebagai Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2019 kategori terpopuler di media online 2019 sub kategori lembaga.



Museum BPK Kota Magelang meraih penghargaan Abiwaru Pariwisata Jateng 2019 sebagai peringkat I Daya Tarik Wisata.



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada BPK RI sebagai Badan Publik Menuju Informatif.





<<<

Rapat Konsultasi BPK RI dengan Komisi XI DPR RI, 5 November 2019.



<<<

Pertemuan BPK RI dengan IAPI, 21 November 2019.



<<<

Ketua BPK Agung Firman Sampurna membuka Rakorwas Itama, 28 November 2019.

>>>

Rapat Konsultasi BPK RI dengan Komite IV DPD RI, dihadiri oleh Anggota V - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V BPK Prof. DR. Bahrullah Akbar MBA dan Anggota VI - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI Prof. DR. Harry Azhar Azis di Auditorium BPK Lt. 2, 30 Oktober 2019.



>>>

Anggota V Bahrullah Akbar - Pimpinan Auditorat Keuangan Negara V BPK membuka *Workshop* Pemeriksaan Kinerja dibuka oleh Anggota V di Ciputra, 20 November 2019.



>>>

Pembukaan PORSENI 2019, 6 Desember 2019.





# e-PPID

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

## PERMINTAAN INFORMASI

### Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website

### Persyaratan

- ◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ◆ Melampirkan:
  - Identitas diri (KTP)
  - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
  - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

### Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

### Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

## PENGADUAN

### Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website

**Verifikasi**  
Verifikasi identitas pelapor dan kelengkapan bukti oleh Petugas PIK

### Pengaduan Lengkap

### Pengaduan Tidak Lengkap

### Bila persyaratan belum lengkap

Pengadu atau Pelapor akan diberikan surat pemberitahuan lewat pos atau email untuk melengkapi dokumen atau surat pemberitahuan tidak dapat ditindaklanjuti

### Bila persyaratan lengkap

1. Petugas PIK memproses penyampaian pelaporan Pengaduan
2. Surat keluar PPID kepada Pengadu/Pelapor sebagai tanggapan

## KEBERATAN ATAS INFORMASI

### Pemohon

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID

Atasan PPID BPK RI harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai

Jika pengaju keberatan tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

KOMISI INFORMASI

## ➤ Pusat Informasi dan Komunikasi BPK

Alamat:  
Jl. Gatot Subroto  
Kav. 31, Jakarta  
Pusat 10210

Website:  
www.bpk.go.id

Telepon:  
(021) 25549000  
ext. 3912

Kotak Surat:  
PO BOX 4300  
JKT 10043

Senin - Kamis  
09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat  
12.00 - 13.00 WIB

Faksimili:  
(021) 57950288

email:  
eppid@bpb.go.id

Jumat  
09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat  
11.30 - 13.00 WIB



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# Kini hadir

# e-PPfD

**permohonan informasi dan  
menyampaikan pengaduan  
semakin mudah**



**e-ppid.bpk.go.id**